

PERAN HUMAS DALAM MENGELOLA KONFLIK
(Studi Deskriptif Kualitatif Rencana Pembangunan Bandara
Internasional di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo Periode
April - Oktober 2014)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Komunikasi

Disusun Oleh:

Ujang Rusli Suherli

11730009

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2015

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Mahasiswa : Ujang Rusli Suherli
Nomor Induk : 11730009
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Konsentrasi : *Public Relations*

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan skripsi saya ini adalah asli hasil karya/penelitian sendiri dan bukan plagiasi dari karya/penelitian orang lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar dapat diketahui oleh anggota dewan penguji.

Yogyakarta, Januari 2015
Yang Menyatakan,



Ujang Rusli Suherli
NIM 11730009



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
FM-UINSK-BM-05-02/R0

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi
Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa, mengarahkan, dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing saya menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Ujang Rusli Suherli

NIM : 11730009

Prodi : Ilmu Komunikasi

Judul : Peran Humas Dalam Mengelola Konflik (Studi Deskriptif Kualitatif Rencana Pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo Periode April – Oktober 2014)

Telah dapat diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana strata satu Ilmu Komunikasi.

Harapan saya semoga saudara tersebut segera dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Januari 2015
Pembimbing

Drs. Siantari Rihartono, M.Si.
NIP. 196003231991031002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/DSH/PP.00.9/0168 /2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : PERAN HUMAS DALAM MENGELOLA KONFLIK
(Studi Deskriptif Kualitatif Rencana Pembangunan
Bandara Internasional di Kecamatan Temon Kabupaten
Kulon Progo Periode April – Oktober 2014)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ujang Rusli Suherli
NIM : 11730009

Telah dimunaqosyahkan pada : Selasa, tanggal: 20 Januari 2015
Dengan nilai : 95 (A)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga

PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH :

Ketua Sidang

Drs. Siantari Rihartono, M.Si
NIP. 19600323 199103 1 002

Penguji I

Fatma Diah Pratiwi, S.Sos., M.Si
NIP. 19750307 200604 2 001

Penguji II

Diah Ajeng Purwani, S.Sos., M.Si
NIP. 19790720 200912 2 001

Yogyakarta, 5-2-2015
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
DEKAN

Prof. Dr. H. Dudung Abdurahman, M.Hum
NIP. 19630306 198903 1 010



MOTTO

"Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning."

(Albert Einstein)

Sebuah impian tidak akan terwujud nyata mana kala tidak ada perjuangan dan usaha untuk mewujudkannya. Meski terkadang tak jarang perjuangan itu harus diretas dengan segala rintangan dan tantangan yang ada didepan mata.

(Dona Arsinta)

Berjalanlah dalam keteguhan maka Tuhan akan membimbingmu.

(Ujang Rusli Suherli)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk almamater tercinta

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah senantiasa melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya. Sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Penyusunan skripsi ini merupakan kajian singkat tentang **“Peran Humas Dalam Mengelola Konflik (Studi Deskriptif Kualitatif Rencana Pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo Periode April – Oktober 2014)”**. Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Dudung Abdurahman, M. Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs. H. Bono Setyo, M. Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Drs. Siantari Rihartono, M. Si, selaku pembimbing skripsi peneliti yang senantiasa memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Fatma Dian Pratiwi, M. Si, selaku penguji I.
5. Diah Ajeng Purwani, M. Si. selaku penguji II sekaligus Dosen Pembimbing Akademik peneliti yang senantiasa memberikan nasehat dan arahan kepada peneliti dan anak-anak KOMA!
6. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terimakasih atas ilmu

dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama dibangku perkuliahan.

7. Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
8. Agung Kurniawan, S.IP., M. Si selaku Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo yang telah memberikan saran dan arahan kepada penulis dalam melakukan penelitian.
9. Bapak Isman, selaku staff Bagian TI dan Humas Setda Pemkab Kulon Progo yang telah berkenan meluangkan waktu dan membantu dalam proses penelitian ini.
10. R. Heriyanto, S.H. selaku Kepala Bagian Adminitrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Kulon Progo yang telah membantu proses penelitian ini.
11. Bapak Agus Parmono, selaku Kepala Desa Glagah yang telah berkenan meluangkan waktu dan membantu proses penelitian ini.
12. Bapak Suhadi, selaku Kabag. Pemerintahan Desa Glagah yang telah berkenan meluangkan waktu dan membantu proses penelitian ini.
13. Andhika Dannysia, selaku Humas PT. Angkasa Pura I (Persero) Yogyakarta terimakasih atas bantuannya yang diberikan kepada penulis.
14. Kedua Orang tua saya yang sangat saya cintai Papah Dudi Sastra Komara dan Mamah Sariah yang tidak henti-hentinya selalu memberikan dukungan, doa serta kasih sayangnya selama ini kepada peneliti sehingga penulis bisa meraih prestasi dan memperoleh gelar S1 Sarjana Komunikasi.
15. Alm. Kakek tercinta Bapak Sutaryo dan Bapak Eman, kenangan, kebersamaan yang tidak akan pernah terlupakan.

16. Neneku Tercinta Mak Waginah & Mak Entut terimakasih atas doa dan kasih sayangnya yang engkau berikan kepada penulis. Aku akan membuatmu bangga nek 😊
17. Keluarga Besar tercinta Mama Tasmini, Mama Satimah, Bi Kartiem, Bi Kartinah, Bi Ucu, Papa Aceng, Mang Kosiman, Mang Wasiman, Mang Anang, Ki Sar'an, Ki Ahum Alm, terimakasih atas dukungan, doa, serta *supportnya* selama peneliti kuliah di Yogyakarta.
18. Kakak Angkatan 2010, Durrotul Mas'udah, Laylly Shahara, Tya Oktaviana, Rifky Syofiadi, terimakasih atas bantuannya yang diberikan kepada peneliti dalam proses pembuatan skripsi ini :*
19. Sahabat terbaikku, Isep Setiawan dan Jevka Ivan Aryandi yang selama ini telah banyak membantu penulis baik suka maupun duka dan ada saat dibutuhkan, terima kasih atas bantuannya selama ini.
20. My Genk "Genk Boo", Astari S, Dunia Restu P, Utami Adiandini, Zhari Afifa, semoga kita semua sukses selalu, Amien. love love kiss kiss :*
21. Teman – teman seperjuangan IKOM 2011! Puteri, Aen, Hana, Saroh, Endah, Matari, Eni, Diti, Dino, Aziz, Nanda, Adi, Idris, Yoga, Danar, Dewa, Singgih, Hari, Feri, dan yang lainnya maaf tidak bisa disebutkan satu persatu semoga kita semua sukses...Amien!
22. Teman-teman KKN 83 KP 105 Pendekan, Tirtorahayu, Galur, Kulon Progo, Kaks Sigit Yudi Nugroho, Kaks Kunwahyudi, Kaks Dian Triyono, Kaks Meiga Dwi Astuti, Kaks Dupi Titi Onggi, Kaks Aris Maulida, Kaks Nurul Khotimah.
23. Bapak Mujiman dan Ibu Mursidah yang sudah peneliti anggap seperti orangtua sendiri di lokasi KKN.

24. Pak Dukuh kece dan pemuda Pendekan, Pak Bunanto, Kaks Wawan, Kaks Wanda, Kaks Bagas, Mas Ari, Mas Jan't, Mbak Fa'i dan seluruh warga Pendekan yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih atas bantuan dan *supportnya* selama penulis melaksanakan KKN.
25. KPMBPJ dan KPM Galuh Rahayu terimakasih atas bantuannya yang diberikan kepada peneliti selama ini, sukses dan jaya selalu buat KPMBPJ dan KPM Galuh Rahayu ☺
26. Teman-teman “Kost The Johits” (Jomblo Ngehits) Alan, Iqro, Irwan, Hilman, Mamat, Rizal, Tri, Wahyu, terimakasih atas *support* dan doa'nya yang diberikan kepada peneliti.
27. Semua pihak yang telah ikut bekerja sama dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Kepada semua pihak tersebut semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima disisi Allah SWT, dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya, Amin. Demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga semua bisa bermanfaat bagi semua pihak. Terimakasih

Yogyakarta, 20 Januari 2015
Penyusun,

Ujang Rusli Suherli
NIM. 11730009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GRAFIK	xv
ABSTRACT	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	11
D. Tinjauan Pustaka	12
E. Landasan Teori	16
F. Metode Penelitian	35

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KAB. KULON PROGO

A. Sejarah dan Perkembangan Pemkab Kulon Progo	42
B. Kondisi Umum Kabupaten Kulon Progo	46
C. Visi dan Misi Kabupaten Kulon Progo	48
D. Lambang, Logo, dan Semboyan Pemkab Kulon Progo	50
E. Bagian Teknologi Informasi dan Humas Pemkab Kulon Progo...	57
F. Pusat Pelayanan Informasi dan Aduan Masyarakat Kulon Progo..	60

BAB III PEMBAHASAN

A. Konflik yang terjadi di Kecamatan Temon	69
1. Tahapan Konflik	77
2. Peran Humas Pemkab Kulon Progo	91
3. Pengelolaan Konflik	100

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	118
B. Saran	125

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Lokasi Mega Proyek Bandara Baru	4
Gambar 2	Warga Sedang Melakukan Aksi Demontrasi	5
Gambar 3	Bentuk Penolakan Warga	6
Gambar 4	Lambang Pemkab Kulon Progo	50
Gambar 5	Logo Kabupaten Kulon Progo Binangun	52
Gambar 6	Penyegelan Balai Desa Glagah	70
Gambar 7	Papan Penolakan Warga	72
Gambar 8	Warga Penolak Bandara Memblokir Jalan Raya	82
Gambar 9	Kegiatan Sosialisasi Bandara	96
Gambar 10	Kegiatan Safari Ramdhan	104
Gambar 11	Syawalan Dengan Warga Terdampak Bandara	104
Gambar 12	Kepala Desa Dari Wilayah Terdampak Sedang Mengikuti Rapat Bandara	114

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Pergerakan Penumpang, Pesawat dan Kargo 2009-2011.....	8
Tabel 2 Matrik Tinjauan Pustaka.....	15

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Data Penumpang Domestik	2
Grafik 2 Data Penumpang Internasional.....	2

ABSTRACT

This research was conducted to describe the role of Kulon Progo Public Relations in managing conflicts, related to the International Airport development plan in Temon. Because Government of Kulon Progo regency was responsible for the conflict about International Airport development plan. Based on the issuing of presidential instruction No. 2, 2013 about home security handling, the government of Kulon Progo plays a role to handle the social conflicts in Temon district related to the plan to the plan of building the International Airport.

This research is a descriptive study in a government agency by using qualitative research methods with the primary and secondary data sources. Data collection techniques used in this study were interviews, observation, and documentation. The technique authenticity of the data used in this study was triangulation. And the analysis techniques used in this study were the model of Miles and Humbermen.

Public Relations Officer of Kulon Progo Regency responsible for managing conflicts in Temon which is related to International Airport Development Plan. PR socializing and solving the problem informally by doing approaches towards people who will be affected by this airport mega project. It can be realized in the form of Safari Ramadan, Syawalan, sympathy, provide assistance to the public facilities and infrastructure, negotiate with the citizens and media, approach judicial and legislative with the police, parliament, sub-district and village heads of the five regions who affected by the airport project in the form of deliberation to formulate the solutions of problems that are happening. Not only that, PR also plays a role in providing the real-time information in accordance with actual situation to the public and media about Airport Development plan in Temon and applying additional punishment for residents who commit vandalism.

Keyword : The Role of Public Relations, Social Conflict, International Airport Development Plan.

BAB I

PENDAHULUAN

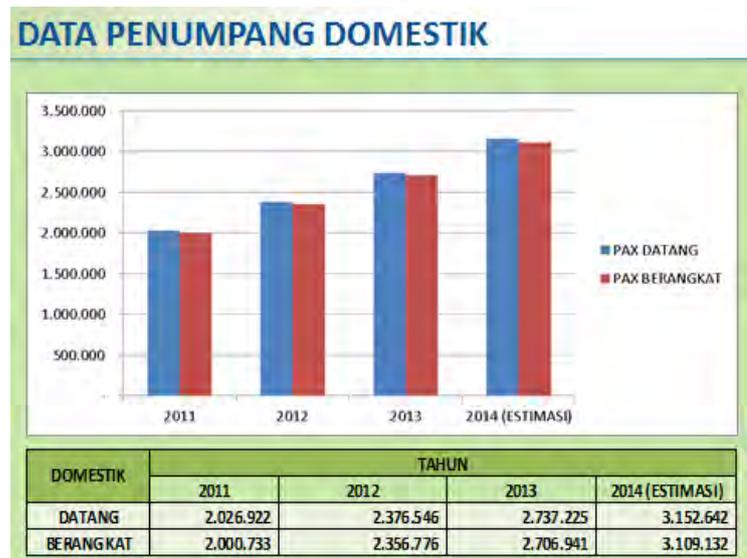
A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan sarana transportasi disebuah negara sangat penting untuk berlangsungnya kehidupan bermasyarakat. Era globalisasi menjadi sebuah tantangan bagi suatu negara karena batas-batas antar negara dan provinsi yang terpisah-pisah. Mengetahui atau mengikuti perkembangan zaman menjadi suatu kewajiban bagi sebuah negara karena persaingan yang semakin ketat baik dalam bidang teknologi, perekonomian, maupun pembangunan, termasuk sarana transportasi. Sarana transportasi yang erat kaitannya dengan perkembangan dan kemajuan suatu negara, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dan sebagai salah satu negara kepulauan yang besar tentunya membutuhkan sarana transportasi yang memadai khususnya sarana transportasi udara untuk menjangkau satu wilayah dengan wilayah lainnya.

Yogyakarta sebagai kota pendidikan, budaya, dan pariwisata, setiap tahunnya terus mengalami peningkatan jumlah kunjungan dari segi moda transportasi udara. Namun, hal tersebut kurang didukung dengan infrastruktur Bandara yang bertaraf internasional yang memadai. Semakin tingginya tingkat kunjungan dan pariwisata ke Yogyakarta dengan menggunakan jasa penerbangan membuat Bandara Adisutjipto sebagai salah satu Bandara Internasional terpadat di Indonesia sudah tidak bisa lagi

mampu menampung penerbangan baik Domestik maupun Internasional yang setiap tahunnya terus meningkat.

Grafik 1
Data Penumpang Domestik



Sumber data: *General Affair and Communication* PT. Angkasa Pura I (Persero) Yogyakarta

Grafik 2
Data Penumpang Internasional



Sumber data: *General Affair and Communication* PT. Angkasa Pura I (Persero) Yogyakarta

Dari data tersebut, dapat dilihat adanya peningkatan jumlah pergerakan pesawat di Bandara Adisutjipto setiap tahunnya. Persoalan yang dialami Bandara Adisutjipto saat ini yaitu hanya dapat menampung 1,2 juta penumpang per tahun. Berdasarkan data trafik tahun 2013, Bandara Adisutjipto telah melayani 64,9 juta pergerakan pesawat, 5,7 juta penumpang, serta 14,5 juta kilogram kargo.

Tabel 1

Data Pergerakan Penumpang, Pesawat dan Kargo 2009-2013

DATA PERGERAKAN PENUMPANG, PESAWAT & CARGO 2009-2013 (DOM DAN INTER)							
NO	TAHUN	PAX		CARGO		AIRCRAFT	
		DTG	BRGKT	DTG	BRGKT	DTG	BRGKT
1	2009	1.682.338	1.623.382	4.008.616	7.204.353	13.325	13.323
2	2010	1.831.209	1.808.744	4.752.110	7.567.368	14.216	14.213
3	2011	2.135.839	2.101.006	4.873.078	7.977.404	16.065	16.026
4	2012	2.489.139	2.456.307	4.975.391	9.484.186	18.383	18.382
5	2013	2.903.915	2.853.645	5.242.951	9.305.013	21.090	21.095
TOTAL		11.042.440	10.843.084	23.852.146	41.538.324	83.079	83.039
TOTAL KESELURUHAN		21.885.524		65.390.470		166.118	

Sumber data: *General Affair and Communication* PT. Angkasa Pura I (Persero) Yogyakarta

Kapasitas sisi darat (*land side*) dan sisi udara (*air side*) Bandara Adisutjipto pun sudah tidak dapat menampung trafik yang ada. Hal tersebut menunjukkan bahwa Bandara Adisutjipto telah mengalami *over capacity*. Selain itu, penggunaan Bandara Adisutjipto saat ini bersama dengan TNI AU sehingga terjadi pembatasan akses (limitasi) dalam penerbangan komersial. Landasan pacu (*run way*) sepanjang 2.200 meter pun sudah tidak bisa diperpanjang lagi karena terdapat jembatan layang Janti dan sungai di sisi barat serta Gunung Boko di sisi timur (Sumber data: *angkasapura1.co.id* 9/4/14 pukul 19.48 WIB).

Over capacity nya Bandara Internasional Adisutjipto membuat Pemerintah dan PT. Angkasa Pura I (Persero) berencana membangun sebuah Bandara Internasional baru di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo sebagai pengganti Bandara Adisutjipto.

Gambar 1

Lokasi Mega Proyek Bandara Baru



Sumber data: *General Affair and Communication* PT. Angkasa Pura I (Persero) Yogyakarta

Namun, rupanya rencana pembangunan Bandara Internasional tersebut menimbulkan pertentangan dari warga yang akan terkena dampak mega proyek Bandara. Masyarakat pesisir selatan Kecamatan Temon yang akan terkena dampak mega proyek Bandara menolak keras rencana pembangunan Bandara Internasional tersebut, seperti yang dilansir *Tribunnews.com* pada Hari Kamis, 10 April 2014 pukul 12.24 WIB:

TRIBUNNEWS.COM, KULONPROGO - Ratusan warga mendatangi kantor Kecamatan Temon untuk melakukan aksi unjuk rasa, Kamis (10/4/2014). Mereka membawa sejumlah spanduk dan poster bertuliskan sikap penolakan warga terhadap rencana pembangunan bandara tersebut. Di antaranya 'Kaum petani, menolak perampasan tanah', 'Pejabat ra mikirke rakyat', 'bandara bikin sengsara', 'Kami menolak data fiktif 550 kk', 'MP3EI adalah proyek kapitalis'. Warga jelas-jelas sudah menolak itu karena sampai sekarang belum ada penjelasan dari pemerintah." (dikutip dari *tribunnews.com* 6/5/14 pukul 7.12 WIB).

Warga yang tergabung dalam kelompok Wahana Tri Tunggal (WTT) sebagai kelompok masyarakat yang kontra terhadap rencana pembangunan Bandara melakukan aksi demonstrasi menuntut pemerintah untuk membatalkan rencana pembangunan Bandara yang akan dibangun di wilayah Kecamatan Temon tersebut. Warga memasang spanduk, papan, dan *tampah* yang beruliskan ancaman dan kritikan-kritikan yang ditujukan kepada Pemkab Kulon Progo dan PT. Angkasa Pura I (Persero) di sepanjang Jalan Glagah Kecamatan Temon.

Gambar 2

Warga Sedang Melakukan Aksi Demonstrasi



Sumber Data: PPID Kulon Progo

Gambar 3

Bentuk Penolakan Warga



Sumber data: Hasil Observasi Peneliti di Lapangan

Adanya penolakan tersebut sampai saat ini pembangunan Bandara Internasional belum bisa dimulai dan terancam molor dari jadwal yang telah ditargetkan yaitu pada awal tahun 2015. Pendirian Bandara Internasional di Kabupaten Kulon Progo ini penting guna memenuhi kapasitas penumpang yang terus meningkat di Bandara Adisutjipto. Selain itu, pembangunan Bandara baru di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon

Progo merupakan bagian dari program pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Penolakan pendirian Bandara Internasional di Kabupaten Kulon Progo disebabkan karena warga resah dan takut rumah serta sumber penghidupannya hilang akibat pembangunan Bandara. Pasalnya, sebagian besar lokasi pembangunan Bandara adalah tanah pertanian yang subur dan produktif, sehingga warga menolak rencana pembangunan Bandara Internasional di Kabupaten Kulon Progo. Warga yang kontra melakukan aksi-aksi penolakan, diantaranya: menolak pembebasan lahan, menolak sosialisasi, memblokade jalan raya, mencabut patok-patok batas Bandara, serta melakukan penyegelan Balai Desa Glagah. Akibatnya sampai saat ini PT. Angkasa Pura I (Persero) belum bisa memulai pembangunan Bandara Internasional tersebut.

Konflik muncul setelah rencana pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo menyeruak dikalangan masyarakat. Konflik semakin memanas ketika pejabat Desa dan pejabat Kecamatan Temon tidak bisa memenuhi keinginan warganya ketika diminta untuk menandatangani pernyataan menolak Bandara. Warga yang akan terkena dampak mega proyek Bandara pun ricuh dan mengamuk di Kecamatan Temon ketika berunjukrasa menolak pendataan terkait pembebasan lahan yang akan dijadikan mega proyek Bandara. Warga menganggap dianaktirikan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo maupun Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena, suara

penolakan warga yang akan terkena dampak mega proyek Bandara tidak didengar dan cenderung diabaikan (Sumber data: *liputan6 petang* diakses 11/5/2014 pukul 8.56 WIB).

Konflik terkait rencana pembangunan Bandara Internasional di Kabupaten Kulon Progo sekarang ini sedang menjadi bahan diskusi khususnya di pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sri Sultan Hamengku Buwono X, selaku Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mengatakan di salah satu media online yaitu *koransindonews.com* pada 14/01/2014, “pihak yang berwenang untuk menyelesaikan masalah ini adalah Pemkab Kulon Progo”. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak akan ikut campur dengan penolakan warga tersebut. Sultan meyakini Pemkab Kulon Progo masih mampu menyelesaikan pertentangan warga tersebut. Pemerintah Provinsi akan mengambil alih penanganan masalah ini jika Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sudah tidak sanggup lagi menangani penolakan warganya.

Dhika, seorang Humas PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Yogyakarta pada saat diwawancarai peneliti 12/06/2014 14.39 mengatakan, “pihak yang bertanggungjawab menangani konflik terkait rencana pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon adalah Pemkab Kulon Progo.” PT. Angkasa Pura I (Persero) hanya bertanggungjawab mengganti kerugian warga yang akan terkena dampak mega proyek Bandara.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo selaku pihak yang berwenang dan bertanggungjawab untuk segera bertindak menangani konflik yang terjadi agar konflik tidak berkepanjangan dan berlarut-larut. Masyarakat akan sangat *sensitive* jika permasalahan ini menyangkut dengan lahan atau tanah pertanian yang bisa menimbulkan hilangnya sumber penghidupan mereka akibat pembangunan Bandara. Karena bagi mereka tanah merupakan sebuah harta yang tak ternilai harganya.

Perlu ada pihak yang berkompeten untuk menangani konflik yang sedang terjadi di masyarakat terkait rencana pembangunan Bandara Internasional tersebut. Pihak yang dimaksud adalah Hubungan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang selanjutnya disebut Humas. Humas dalam instansi pemerintahan harus mampu menjadi pemecah masalah atau konflik di wilayahnya, serta memberikan penerangan dan informasi tentang apa yang telah diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terkait rencana pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon.

Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Hujurât ayat 9:

طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا أَصْلِحُوا فَبَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا
الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ صِلِحُوا فَبَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.

Artinya: Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (Sumber: *quran.ittelkom.ac.id* diakses 22/05/2014 pukul 15.59 WIB).

Dari ayat tersebut, dapat diambil pengertian bahwa dalam konflik perlu ada pihak yang menjadi penengah dan juga mediator untuk mendamaikan keduanya dengan cara bersikap netral dan adil sehingga bisa mencapai kesepakatan dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Jika dikaitkan dengan konflik sosial yang terjadi terkait rencana pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon, pihak yang dimaksud menjadi penengah adalah Humas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

Humas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo merupakan pihak yang berwenang dan bertanggungjawab untuk menangani permasalahan yang terjadi di Kecamatan Temon. Karena, Humas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo merupakan suatu alat atau saluran untuk memperlancar jalanya interaksi dan penyebaran informasi mengenai publikasi pembangunan nasional di Kabupaten Kulon Progo. Maka maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Peran Humas Pemkab Kulon Progo Dalam Mengelola Konflik Terkait Rencana Pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon periode April - Oktober 2014.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka peneliti merumuskan permasalahan yang ada sebagai berikut, **“Bagaimana Peran Humas Pemkab Kulon Progo Dalam Mengelola Konflik Terkait Rencana Pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon Periode April – Oktober 2014?”**

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Humas Pemkab Kulon Progo Dalam Mengelola Konflik Terkait Rencana Pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon periode April – Oktober 2014.

2. Manfaat Penelitian

a. Akademis

- 1) Bagi Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi penelitian ini dapat menambah referensi yang ada dan dapat digunakan pada pengembangan penelitian, terutama yang berkaitan dengan Manajemen Konflik Kehumasan.
- 2) Bagi pihak lain, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi yang positif dan menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.

b. Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Manajemen PT. Angkasa Pura I (Persero) dalam menganalisis konflik perusahaan/instansi pemerintahan.
- 2) Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan penambah wawasan dan sumbangan kepustakaan, bagi pembaca yang memiliki minat lebih dalam materi yang serupa atau berkaitan dapat dijadikan acuan dalam penelitian lanjutan di masa yang akan datang.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ditunjukkan agar peneliti tidak mempunyai kesamaan dengan yang akan diteliti. Pertama peneliti akan membandingkan dengan penelitian yang dilakukan Mahasiswi Universitas Atmajaya Yogyakarta pada tahun 2014 yang berjudul “***MANAJEMEN KONFLIK DI CIMB NIAGA CABANG YOGYAKARTA***” (*Studi Kasus Penanganan Konflik Antara Karyawan ex Bank Lippo dan Karyawan ex Bank Niaga Pasca Merger pada Periode November 2008 - November 2010*). Dalam penelitiannya, skripsi ini membahas mengenai manajemen konflik di Bank CIMB Niaga Cabang Yogyakarta Pasca *Merger* pada periode November 2008 - November 2010. Metode penulisan yang digunakan yaitu metode studi kasus dengan menggunakan pendekatan

kualitatif. Penentuan subjek menggunakan *purposive* dan *snowball sampling*. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Persamaan dari penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada pendekatan kualitatif serta metode pengumpulan data yang menggunakan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan perbedaannya terletak pada permasalahan penelitian, subjek, objek, tujuan penelitian, dan lokasi penelitian. Permasalahan penelitian yang akan peneliti ambil yaitu Peran Humas dalam mengelola konflik terkait rencana pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo periode April – Oktober 2014. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Felicia yaitu manajemen konflik di CIMB Niaga cabang Yogyakarta pasca *Marger* pada Periode November 2008 - November 2010.

Pustaka Kedua yang peneliti gunakan ialah skripsi yang berjudul ***“Konflik Antara Masyarakat Dengan Penambang Pasir Besi” (Studi Kasus Di Desa Garongan Kecamatan Panjataan Kabupaten Kulon Progo)***. Karya Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2012. Skripsi ini membahas mengenai konflik antara masyarakat dengan penambang pasir besi di Desa Garongan, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode pendekatan kualitatif dengan sumber data primer dan sumber data sekunder. Penentuan subjek menggunakan *purposive sampling*, sedangkan metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi. Metode

analisis yang digunakan adalah menggunakan model Lexy J. Moleong. Metode keabsahan data menggunakan teknik triangulasi menurut Lexy J. Moleong.

Persamaan dari penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu terletak pada metode penelitian yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sumber data primer dan skunder, metode pengumpulan data yang menggunakan wawancara dan observasi, serta penentuan subjek yang menggunakan *purposive sampling*. Sedangkan perbedaannya terdapat pada permasalahan penelitian, lokasi penelitian, subjek, objek, tujuan penelitian, metode keabsahan data dan metodologi penelitian. Dimana dalam uji validitas Wahyono menggunakan teknik triangulasi data. Sedangkan peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dalam uji validitas.

Pustaka Ketiga adalah penelitian dari Imelda Rettobjaan tahun 2013 yang berjudul “*Peran Humas Dalam Merespon Konflik Internal Pada Universitas Sam Ratulangi Manado*”. Jurnal ini membahas mengenai peran Humas dalam merespon konflik di Universitas Sam Ratulangi Manado. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama mengangkat Peran Humas, serta metode penelitian yang digunakan. Sedangkan perbedaannya terdapat pada sasaran subjek, objek, tujuan penelitian, dan lokasi penelitian.

Tabel 2
Matrik Tinjauan Pustaka

No	Peneliti	Judul	Lokasi	Metode	Tujuan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Felicia Lucky Yunita Indraswari	“Manajemen Konflik Di Cimb Niaga Cabang Yogyakarta” (Studi Kasus Penanganan Konflik Antara Karyawan <i>ex</i> Bank Lippo dan Karyawan <i>ex</i> Bank Niaga Pasca Merger pada Periode November 2008 - November 2010).	Bank CIMB Niaga Cabang Yogyakarta	Deskriptif	Mengetahui manajemen konflik di Bank CIMB Niaga Cabang Yogyakarta dalam periode November 2008 – November 2010 Pasca Merger.	Perbedaan dari ketiganya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada objek penelitian, ruang lingkup
2.	Wahyono Setyawan	Konflik Antara Masyarakat Dengan Penambang Pasir Besi. (Studi Kasus Di Desa Garongan Kecamatan Panjataan Kabupaten Kulon Progo)	Desa Garongan Kecamatan Panjataan Kabupaten Kulon Progo	Deskriptif	Mendesripsikan mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi konflik, bentuk-bentuk konflik akibat penambangan pasir besi, dan dampak yang ditimbulkan akibat konflik penambangan pasir besi.	penelitian, fokus penelitian, serta tujuan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian yang benar - benar peneliti lakukan
3.	Imelda Rettobjaan	Peran Humas Dalam Merespon Konflik Internal Pada Universitas Sam Ratulangi Manado	Universitas Sam Ratulangi Manado	Deskriptif	Mengetahui Peran Humas Dalam Merespon Konflik Internal Pada Universitas Sam Ratulangi Manado	sendiri dan hasilnya diperoleh tanpa mengambil proses dan
4.	Ujang Rusli Suherli (Peneliti)	Peran Humas Dalam Mengelola Konflik. (Studi Deskriptif Kualitatif Rencana Pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo Periode April – Oktober 2014	Pemkab Kulon Progo	Deskriptif	Mengetahui Peran Humas Pemkab Kulon Progo Dalam Mengelola Konflik Terkait Rencana Pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon Periode April – Oktober 2014	hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.

Sumber data: Olahan peneliti

E. Landasan Teori

1. Hubungan Masyarakat (Humas)

a. Pengertian Humas

Menurut Rosady Ruslan (2007: 15-16) Banyak pakar telah mengemukakan pendapat tentang defenisi dan pengertian Humas. Sebagai acuan, salah satu definisi Humas yang diambil dari *The British Institute of Public Relations*, berbunyi:

- 1) *“Public Relations activity is a management of communications between an organization and its publics.”*

(Aktivitas Humas adalah mengelola komunikasi antara organisasi dan publiknya).

- 2) *“Public Relations practice is deliberate, planned and sustain effort to establish and maintain mutual understanding between an organization and its public.”*

(Praktik Humas adalah memikirkan, merencanakan, dan mencurahkan daya untuk membangun dan menjaga saling pengertian antara organisasi dan publiknya).

Dr. Rex Harlow dalam bukunya yang berjudul: *A Model for Public Relations Education for Professional Practices* yang diterbitkan oleh *International Public Relations Association* (IPRA) 1978, menyatakan bahwa definisi *Public Relations* adalah: “*Public Relations* adalah fungsi manajemen yang khas dan mendukung pembinaan, pemeliharaan jalur bersama antara organisasi dengan publiknya, menyangkut aktivitas komunikasi, pengertian, penerimaan dan kerjasama; melibatkan manajemen dalam menghadapi persoalan/permasalahan, membantu manajemen untuk mampu menanggapi opini publik; mendukung manajemen dalam mengikuti dan memanfaatkan perubahan secara efektif; bertindak sebagai sistem peringatan dini dalam mengantisipasi kecenderungan penggunaan penelitian serta teknik komunikasi yang sehat dan etis sebagai sarana utama”.

Menurut Edward L. Bernay, dalam Rosady Ruslan (2007: 18), terdapat 3 fungsi utama Humas, yaitu:

1. Memberikan penerangan kepada masyarakat.
2. Melakukan persuasi untuk mengubah sikap dan perbuatan masyarakat secara langsung.
3. Berupaya untuk mengintegrasikan sikap dan perbuatan suatu badan/lembaga sesuai dengan sikap dan perbuatan masyarakat atau sebaliknya.

Kemudian, berdasarkan ciri khas kegiatan Humas/*Public Relations* tersebut, menurut pakar Humas Internasional, Cutlip dan Center, and Canfield dalam Rosady Ruslan (2007: 19), fungsi *Public Relations* dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Menunjang aktivitas utama manajemen dalam mencapai tujuan bersama (fungsi melekat pada manajemen lembaga/organisasi).
2. Membina hubungan baik yang harmonis antara badan/organisasi dengan publiknya yang merupakan khalayak sasaran.
3. Mengidentifikasi segala sesuatu yang berkaitan dengan opini, persepsi dan tanggapan masyarakat terhadap badan/organisasi yang diwalikinya, atau sebaliknya.
4. Melayani keinginan publiknya dan memberikan sumbangan saran kepada pemimpin manajemen demi tujuan dan manfaat bersama.
5. Menciptakan komunikasi dua arah timbal balik, dan mengatur arus informasi, publikasi serta pesan dari badan/organisasi kepada publiknya atau sebaliknya, demi tercapainya citra positif bagi kedua belah pihak.

b. Humas Pemerintah

Keberadaan unit Kehumasan (Hubungan Masyarakat) di sebuah lembaga atau instansi milik pemerintah merupakan keharusan secara fungsional dan operasional dalam upaya menyebarluaskan atau untuk mempublikasikan tentang suatu kegiatan atau aktivitas instansi bersangkutan yang ditujukan baik untuk hubungan masyarakat kedalam, maupun kepada masyarakat luar pada umumnya. Humas merupakan suatu alat atau saluran untuk memperlancar jalanya interaksi dan penyebaran informasi mengenai publikasi pembangunan nasional melalui kerjasama dengan pihak pers, media cetak atau elektronik dan hingga menggunakan media tradisional lainnya (Rosady Ruslan, 2007: 342-343).

Menurut Rosady Ruslan (2007: 341-342) perbedaan pokok antara fungsi dan tugas Hubungan Masyarakat yang terdapat di instansi pemerintah dengan non pemerintah (lembaga komersial) adalah tidak adanya unsur komersial walaupun Humas Pemerintah juga melakukan hal yang sama dalam kegiatan publikasi, promosi dan periklanan. Humas pemerintah lebih menekankan pada *public service* atau demi meningkatkan pelayanan umum.

Tugas Humas Pemerintah/instansi pemerintahan yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengamati dan mempelajari tentang hasrat, keinginan-keinginan dan aspirasi yang terdapat dalam masyarakat (*learning about public desires and aspiration*).
- 2) Kegiatan memberi nasihat atau sumbang saran untuk menanggapi apa sebaiknya dilakukan oleh instansi/lembaga pemerintah seperti yang dikehendaki oleh pihak publiknya (*advising the public about what is should desire*).
- 3) Kemampuan untuk mengusahakan terjadinya hubungan memuaskan yang diperoleh antara hubungan publik dengan para aparat pemerintah (*ensuring satisfactory contact between public and government official*).
- 4) Memberikan penerangan dan informasi tentang apa yang telah diupayakan oleh suatu lembaga atau instansi pemerintahan yang bersangkutan (*informing and about what an agency is doing*).

Menurut Dimcok dan Koenig (1987) dalam Rosady Ruslan (2007: 342), pada umumnya tugas-tugas dari pihak Humas instansi atau lembaga pemerintahan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Upaya memberikan penerangan atau informasi kepada masyarakat tentang pelayanan masyarakat, kebijaksanaan serta tujuan yang akan dicapai oleh pemerintah dalam melaksanakan program kerja tersebut.
- 2) Mampu untuk menanamkan keyakinan dan kepercayaan serta mengajak masyarakat dalam partisipasinya atau ikut serta pelaksanaan program pembangunan, sosial, budaya, ekonomi, politik serta menjaga stabilitas dan keamanan nasional.
- 3) Kejujuran dalam pelayanan dan pengabdian dari aparatur pemerintah yang bersangkutan perlu dipelihara atau dipertahankan dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya masing-masing.

c. Peranan Hubungan Masyarakat

Rosady Ruslan dalam bukunya yang berjudul “*Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi*” (2007: 20-21), menjelaskan bahwa dalam menjalankan kegiatannya Hubungan Masyarakat berperan sebagai berikut:

1) Penasihat Ahli

Seorang praktisi pakar *Public Relations* yang berpengalaman dan memiliki kemampuan tinggi dapat membantu mencari solusi dalam penyelesaian masalah hubungan dengan publiknya (*public relationship*).

2) Fasilitator Komunikasi

Praktisi *Public Relations* bertindak sebagai komunikator atau mediator untuk membantu pihak manajemen dalam hal untuk mendengar apa yang diinginkan dan diharapkan oleh publiknya.

3) Fasilitator Proses Pemecahan Masalah

Peranan praktisi *Public Relations* dalam proses pemecahan persoalan *Public Relations* ini merupakan bagian dari tim manajemen. Hal ini dimaksudkan untuk membantu pimpinan organisasi baik sebagai penasihat (*adviser*) hingga mengambil tindakan eksekusi (keputusan) dalam mengatasi persoalan atau krisis yang tengah dihadapi secara rasional dan professional.

4) Teknisi Komunikasi

Berbeda dengan tiga peranan praktisi *Public Relations* Profesional sebelumnya yang terkait erat dengan fungsi dan peranan manajemen organisasi. Peranan *Communication Technican* ini menjadikan praktisi *Public Relations* sebagai *journalist in resident* yang hanya menyediakan layanan teknis komunikasi atau dikenal dengan *method of communication*.

2. Konflik

a. Pengertian Konflik

Konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik yang beragam. Manusia memiliki perbedaan jenis kelamin, strata sosial dan ekonomi, sistem hukum, bangsa, suku, agama, kepercayaan, aliran politik, serta budaya dan tujuan hidupnya. Dalam sejarah umat manusia, perbedaan inilah yang selalu menimbulkan konflik. Selama masih ada perbedaan tersebut, konflik tidak dapat dihindari dan selalu akan terjadi (Wirawan, 2009: 1-2).

Konflik didefinisikan sebagai persaingan antara individu atau antara kelompok. Fisher, dkk (2001: 4), menyatakan bahwa konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau

kelompok) yang memiliki, atau yang merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan.

Disisi lain konflik didefinisikan sebagai perselisihan dan pertentangan yang tajam, sebagai kepentingan, ide, dan lain sebagainya dan melibatkan perbedaan yang dirasakan dari kepentingan, atau keyakinan bahwa saat ini aspirasi pihak tidak dapat dicapai secara bersamaan. Konflik dihasilkan dari interaksi orang-orang yang saling tergantung dan menerima tujuan yang bertentangan dan gangguan satu sama lain dalam mencapai tujuan tersebut. (Roy J. Lewicki, dkk, 2012: 22).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang disusun oleh Poerwadarmita (1997) dalam Novri Susan (2009: 4) konflik diartikan sebagai percekocokan, perselisihan atau pertentangan. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (atau juga kelompok) yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tak berdaya.

Berdasarkan pernyataan diatas tidak ada satu masyarakat pun yang dalam proses perkembanganya tidak mengalami konflik sosial. Secara komplementer dan secara bersama-sama berada struktur sosial masyarakat yang lebih luas dengan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan sebagai pegangan umum. Dengan

kata lain bahwa pada saat yang sama tercipta kondisi terintegrasi diantara para penganut paham yang berbeda dengan cara mengorganisasi dan mewujudkan simbol-simbol yang berlaku.

b. Teori Penyebab Konflik

Menurut Fisher dkk (2001: 7), Ada berbagai macam teori mengenai penyebab konflik untuk membantu dalam memahami cara-cara mengelola konflik, yaitu :

1) Teori Hubungan Masyarakat

Menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Sasaran: meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok yang mengalami konflik, serta mengusahakan toleransi dan agar masyarakat lebih bisa saling menerima keragaman yang ada didalamnya.

2) Teori Negosiasi Prinsip

Menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik. Sasaran: membantu pihak yang

berkonflik untuk memisahkan perasaan pribadi dengan berbagai masalah dan isu dan memampukan mereka untuk melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan mereka daripada posisi tertentu yang sudah tetap. Kemudian melancarkan proses kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak atau semua pihak.

3) Teori Kebutuhan Manusia

Menganggap bahwa konflik yang berakar disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia (fisik, mental dan sosial) yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Hal yang sering menjadi inti pembicaraan adalah keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi, dan otonomi. Sasaran: mengidentifikasi dan mengupayakan bersama kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, serta menghasilkan pilihan-pilihan untuk memenuhi kebutuhan itu.

4) Teori Identitas

Berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak diselesaikan. Sasaran: melalui fasilitas lokakarya dan dialog antara pihak-pihak yang mengalami konflik,

sehingga dapat mengidentifikasi ancaman dan ketakutan di antara pihak tersebut dan membangun empati dan rekonsiliasi di antara mereka.

5) Teori Kesalahpahaman Antar Budaya

Berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda. Sasaran: menambah pengetahuan kepada pihak yang berkonflik mengenai budaya pihak lain, mengurangi stereotip negatif yang mereka miliki tentang pihak lain, meningkatkan keefektifan komunikasi antarbudaya.

6) Teori Transformasi Konflik

Berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah sosial, budaya dan ekonomi. Sasaran: mengubah struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan termasuk kesenjangan ekonomi, meningkatkan jalinan hubungan dan sikap jangka panjang di antara pihak yang berkonflik, mengembangkan proses dan sistem untuk mempromosikan pemberdayaan, keadilan, perdamaian, pengampunan, rekonsiliasi, pengakuan.

c. Jenis Konflik

Menurut Wirawan (2009: 55-62), jenis konflik dapat dikelompokkan berdasarkan berbagai kriteria, diantaranya:

1) Konflik Personal

Konflik yang terjadi dalam diri seseorang individu karena harus memilih dari sejumlah alternatif pilihan yang ada atau karena mempunyai keperibadian ganda.

2) Konflik Realitas

Konflik yang terjadi karena perbedaan dan ketidaksepahaman cara pencapaian tujuan atau mengenai tujuan yang akan dicapai. Dalam konflik jenis ini, interaksi konflik memfokuskan pada isu ketidaksepahaman mengenai substansi atau objek konflik yang harus diselesaikan oleh pihak yang terlibat konflik. Disini metode manajemen konflik yang digunakan adalah dialog, persuasi, musyawarah, *voting*, dan negosiasi.

3) Konflik Konstruktif

Konflik yang prosesnya mengarah kepada mencari solusi mengenai substansi konflik. Konflik jenis ini membangun sesuatu yang baru atau

mempererat hubungan pihak-pihak yang terlibat konflik ataupun mereka memperoleh sesuatu yang bermanfaat dari konflik.

Pihak-pihak yang terlibat secara fleksibel menggunakan berbagai teknik manajemen konflik, seperti negosiasi, *give and take*, humor, bahkan *voting* untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

d. Tahapan Konflik

Menurut Fisher, dkk (2001: 19), ada lima tahap konflik, diantaranya:

1) Prakonflik

Ini merupakan periode di mana terdapat suatu ketidaksesuaian sasaran diantara dua pihak atau lebih, sehingga timbul konflik. Konflik tersembunyi dari pandangan umum, meskipun satu pihak atau lebih mungkin mengetahui potensi terjadinya konfrontasi. Mungkin terdapat ketegangan hubungan diantara beberapa pihak atau keinginan untuk menghindari kontak satu sama lain.

2) Konfrontasi

Pada tahap ini semakin terbuka. Jika satu pihak yang ada merasa masalah, mungkin para pendukungnya mulai melakukan aksi demonstrasi atau perilaku konfrontatif lainnya. Kadang pertikaian atau kekerasan pada tingkat rendah lainnya terjadi di antara dua belah pihak. Masing-masing pihak mungkin mengumpulkan sumber daya dan kekuatan.

3) Krisis

Ini merupakan puncak konflik, ketika ketegangan dan kekerasan terjadi hebat. Komunikasi normal di antara kedua pihak kemungkinan putus. Pernyataan-pernyataan umum cenderung menuduh dan menentang pihak lainnya.

4) Akibat

Suatu krisis pasti akan menimbulkan suatu akibat. Suatu pihak mungkin menyerah atau menyerah atas desakan pihak lain. Kedua pihak mungkin setuju bernegosiasi, dengan atau tanpa bantuan perantara. Suatu pihak yang mempunyai otoritas atau pihak ketiga lainnya yang lebih berkuasa mungkin memaksa kedua belah pihak menghentikan pertikaian. Apa pun

keadaanya, tingkat ketegangan, konfrontasi dan kekerasan pada tahap ini agak menurun, dengan kemungkinan adanya penyelesaian.

5) Pascakonflik

Akhirnya, situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang dan hubungan mengarah ke lebih normal di antara dua belah pihak. Namun, jika isu-isu dan masalah-masalah yang timbul karena sasaran mereka yang saling bertentangan tidak diatasi dengan baik, tahap ini sering kembali lagi menjadi situasi prakonflik.

e. Pengelolaan Konflik

Menurut Moore dalam Susan Novri (2003: 6-12), ada beberapa bentuk pengelolaan konflik, diantaranya :

1) Avoidance

Pihak-pihak berkonflik saling menghindari dan mengharapkan konflik bisa terselesaikan dengan sendirinya.

2) Informal Problem Solving

Pihak-pihak yang berkonflik setuju dengan pemecahan masalah yang diperoleh secara informal.

3) Negotiation

Ketika konflik masih terus berlanjut, maka para pihak berkonflik perlu melakukan negosiasi. Artinya, mencari jalan keluar dan pemecahan masalah secara formal. Hasil negosiasi bersifat *procedural* yang mengikat semua pihak yang terlibat dalam negosiasi.

4) Mediation

Munculnya pihak ketiga yang diterima oleh kedua pihak karena bisa dipandang membantu para pihak berkonflik dalam penyelesaian konflik secara damai.

5) Executive Dispute Resolutions Approach

Kemunculan pihak lain yang memberi suatu bentuk penyelesaian konflik.

6) Arbitration

Suatu proses tanpa paksaan dari pihak berkonflik untuk mencari pihak ketiga yang dipandang netral atau imparisial.

7) Judicial Approach

Terjadinya intervensi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga berwenang dalam memberi kepastian hukum.

8) Legislative Approach

Intervensi melalui musyawarah politik dari lembaga perwakilan rakyat, kasus-kasus konflik kebijakan sering menggunakan pendekatan ini.

9) Extra Legal Approach

Penanganan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuatan legal dan mungkin tidak dimiliki oleh pihak lawan. Salah satu pihak bisa memanfaatkan kekuatan untuk menciptakan *nonviolent action* dan *violence*.

Dengan poin-poin unit analisis yang telah dipaparkan tersebut, Humas akan mengetahui bagaimana cara menangani konflik yang terjadi. Dengan harapan konflik dapat terselesaikan dengan baik agar proses pembangunan Bandara cepat ter-realisasi dan diharapkan bisa membawa kesejahteraan masyarakat Kulon Progo yang terkena mega proyek Bandara. Seperti ayat Al Qur'an di bawah ini:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَا هُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Artinya: “Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (Al-A'araaf, 7: 96).

Ayat tersebut jika dikaitkan dengan kasus yang sedang terjadi maka dapat diambil pengertian, jika semua warga Kulon Progo yang berada disekitar mega proyek Bandara setuju dengan pembangunan Bandara, maka ada hal-hal yang mengarah kepada kondisi yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan PT. Angkasa Pura I (Persero) akan berusaha meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan bagi masyarakat. Karena bagi Kabupaten Kulon Progo, pembangunan Bandara tersebut merupakan satu-satunya jembatan emas untuk menuju kemakmuran yang lebih baik demi kemajuan pembangunan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kulon Progo. Tetapi jika warga

Kulon Progo tidak setuju dan justru memprotes pendirian Bandara baru, maka ada kemungkinan Kabupaten Kulon Progo akan kehilangan kesempatan emas tidak bisa memiliki sebuah Bandara Internasional.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti ialah Metode Penelitian Kualitatif, penelitian ini merupakan studi deskriptif pada suatu instansi pemerintah. *Qualitative research* (riset kualitatif) merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur *statistic* atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian deskriptif kualitatif umumnya dilakukan pada penelitian studi kasus. Deskriptif kualitatif studi kasus tidak memiliki ciri seperti air (menyebar dipermukaan), tetapi memusatkan diri pada suatu unit tertentu dari berbagai fenomena (Bungin, 2007: 68).

Deskriptif kualitatif juga dapat diuraikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau menuliskan keadaan subjek atau objek penelitian. Humas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebagai subjek dan objek yang diteliti ialah Peran Humas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

dalam mengelola konflik terkait rencana pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon periode April – Oktober 2014.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah Humas Pemkab Kulon Progo. Penentuan subjek tersebut menggunakan teknik *purposive sampling*. Penentuan subjek melalui teknik ini bertujuan untuk menyeleksi orang-orang (informan/narasumber) atas dasar kriteria tertentu yang dibuat peneliti berdasarkan tujuan penelitian (Kriyantono, 2006: 154).

b. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu yang ingin diketahui atau diteliti dari subjek penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah Peran Humas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam mengelola konflik terkait rencana pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon periode April – Oktober 2014.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Jenis Data

Ada dua jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data skunder.

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dilapangan dari subjek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara mendalam terhadap narasumber mengenai Peran Humas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam mengelola konflik sebagai metode pengumpulan data primer.

2) Data Sekunder

Merupakan data yang digunakan peneliti untuk membantu dan mendukung data primer. Peneliti menggunakan metode Observasi dan Dokumentasi, sebagai pelengkap dalam metode pengumpulan data yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilaksanakan di Pemkab Kulon Progo.

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan penelitian ini teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan (Bungin, 2007: 111).

Dengan wawancara peneliti mendapatkan data-data yang dibutuhkan secara langsung dari sumber, sehingga data yang didapat akan lebih akurat. Wawancara peneliti lakukan terhadap pihak Pemkab Kulon Progo, Pemerintah Desa Glagah dan warga yang menolak rencana pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon.

2) Observasi

Peneliti juga melakukan observasi dalam melaksanakan penelitiannya. Observasi adalah

kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatan melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu panca indra lainnya (Bungin, 2007: 115).

Peneliti melakukan observasi terhadap objek ditempat terjadi dan berlangsungnya suatu peristiwa, sehingga peneliti berada bersama objeknya yang akan diteliti.

3) Dokumentasi

Merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metode penelitian sosial. Jenis data yang digunakan dalam pengumpulan data sebagian besar yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cendera mata, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian (Bungin, 2007: 125).

Dokumentasi yang peneliti gunakan dalam pengumpulan data tersebut berupa Foto-foto, rekaman video, dan surat-surat tertulis yang berkaitan dengan tema penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian deskriptif ini, data-data yang telah diperoleh telah peneliti analisis dengan menggunakan model Miles dan Humbermen (Moleong, 2002: 248) yang meliputi:

a) Pengumpulan Data

Data yang didapatkan peneliti dikumpulkan berdasarkan teknik pengumpulan data yang telah dipaparkan diatas meliputi Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi.

b) Reduksi Data

Merupakan proses seleksi atau pemilihan data, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan dan verifikasi.

c) Penyajian Data

Data-data yang diperoleh langsung dilapangan berupa hasil wawancara dan dokumentasi akan dianalisis sesuai dengan teori yang telah dipaparkan.

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

A. Sejarah dan Perkembangan Pemkab Kulon Progo

Sebelum terbentuknya Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 15 Oktober 1951, wilayah Kulon Progo terbagi atas dua kabupaten yaitu Kabupaten Kulon Progo yang merupakan wilayah Kasultanan Nyayogyakarta Hadiningrat dan Kabupaten Adikarta yang merupakan wilayah Kadipaten Pakualaman.

1. Wilayah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat (Kabupaten Kulon Progo)

Sebelum perang Diponegoro di daerah Negaragung, termasuk di dalamnya wilayah Kulon Progo, belum ada pejabat pemerintahan yang menjabat di daerah sebagai penguasa. Pada waktu itu roda pemerintahan dijalankan oleh pepatih dalem yang berkedudukan di Ngayogyakarta Hadiningrat. Setelah Perang Diponegoro 1825-1830 di wilayah Kulon Progo sekarang yang masuk wilayah Kasultanan terbentuk empat Kabupaten yaitu :

- a. Kabupaten Pengasih, tahun 1831
- b. Kabupaten Sentolo, tahun 1831
- c. Kabupaten Nanggulan, tahun 1851
- d. Kabupaten Kalibawang, tahun 1855

Masing-masing kabupaten tersebut dipimpin oleh para Tumenggung. Menurut buku 'Prodjo Kejawen' pada tahun 1921 Kabupaten Pengasih, Sentolo, Nanggulan, dan Kalibawang digabung menjadi satu dan diberi nama Kabupaten Kulon Progo, dengan ibukota Pengasih. Bupati pertama dijabat oleh Raden Tumenggung Poerbowinoto. Dalam perjalanannya, sejak 16 februari 1927 Kabupaten Kulon Progo dibagi atas dua Kawedanan dengan delapan Kapanewon, sedangkan ibukotanya dipindahkan ke Sentolo. Dua Kawedanan tersebut adalah Kawedanan Pengasih yang meliputi Kawedanan Lendah, Sentolo, Pengasih, dan Kokap/Sermo. Kawedanan Nanggulan meliputi Kapanewon Watumurah/Girimulyo, Kalibawang, dan Samigaluh. Pejabat Bupati di Kabupaten Kulon Progo sampai dengan tahun 1951 adalah sebagai berikut:

- a. KRT. Poerbowinoto
- b. KRT. Notoprajarto
- c. KRT. Harjodiningrat
- d. KRT. Djojodiningrat
- e. KRT. Pringgodingrat
- f. KRT. Setjodiningrat
- g. KRT. Poerwoningrat

2. Wilayah Kadipaten Pakualaman (Kabupaten Adikarta)

Di daerah selatan Kulon Progo ada satu wilayah yang masuk Keprajen kejawen yang bernama Karang Kemuning yang selanjutnya dikenal dengan Kabupaten Adikarta. Menurut buku ‘Vorstenlander’ disebutkan bahwa pada tahun 1831 Pangeran Notokusuman diangkat menjadi KGPA Ario Paku Alam I dan mendapat palungguh di sebelah barat Sungai Progo sepanjang yang dikenal dengan nama pasir Urut Sewu. Oleh karena tanah pelungguh itu letaknya berpencaran, maka Sentono Ndalem Paku Alam yang bernama Kyai Kawirejo I menasehatkan agar tanah palungguh tersebut disatukan letaknya. Dengan disatukannya pelungguh tersebut, maka menjadi satu daerah kesatuan yang setingkat kabupaten. Daerah ini kemudian diberi nama Kabupaten Karang Kemuning dengan ibukota Brosot. Sebagai Bupati yang pertama adalah Tumenggung Sosrodigoyo. Bupati kedua, R. Rio Wasadirdjo, mendapat perintah dari KGPA Paku Alam V agar mengusahakan pengeringan Rawa di Karang Kemuning. Rawa-rawa yang dikeringkan itu kemudian dijadikan tanah persawahan yang Adi (Linuwih) dan Karta (Subur) atau daerah yang sangat subur. Oleh karena itu, maka Sri Paduka Paku Alam V lalu berkenan menggantikan nama Karang Kemuning menjadi Adikarta pada tahun 1877 yang beribukota di Bendungan.

Kemudian pada 1903 ibukotanya dipindahkan ke Wates. Kabupaten Adikarta terdiri dua Kawedanan (distrik) yaitu Kawedanan Sogan dan Kawedanan Galur. Kawedanan Sogan meliputi Kapanewon (onder distrik) Wates dan Temon, sedangkan Kawedanan Galur meliputi Kapanewon Brosot dan Panjatan. Bupati di Kabupaten Adikarta sampai dengan tahun 1951 berturut-turut sebagai berikut :

- a. Tumenggung Sosrodigdoyo
- b. R. Rio Wasadirdjo
- c. R.T. Surotani
- d. R.M.T. Djayengirawan
- e. R.M.T. Notosubroto
- f. K.R.M.T. Suryoningrat
- g. Mr. K.R.T. Brotodiningrat
- h. K.R.T. Suryaningrat (Sungkono)

3. Penggabungan Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Adikarta

Pada 5 September 1945 Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Pakualam VIII mengeluarkan amanat yang menyatakan bahwa daerah beliau yaitu Kasultanan dan Pakualam adalah daerah yang bersifat kerajaan dan daerah istimewa dari Negara

Republik Indonesia. Pada tahun 1951, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Pakualam VIII memikirkan perlunya penggabungan antara wilayah Kasultanan yaitu Kabupaten Kulon Progo dengan wilayah Pakualam yaitu Kabupaten Adikarta. Atas dasar kesepakatan dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Pakualam VIII, maka oleh pemerintah pusat dikeluarkan UU No. 18 Tahun 1951 yang ditetapkan tanggal 12 Oktober 1951 dan diundangkan tanggal 15 Oktober 1951. Undang-undang ini mengatur tentang perubahan UU. No. 15 tahun 1950 untuk penggabungan daerah Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Adikarta dalam lingkungan DIY menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo yang selanjutnya berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Undang-undang tersebut mulai berlaku mulai tanggal 15 Oktober 1951. Secara yuridis formal hari jadi Kabupaten Kulon Progo adalah tanggal 15 Oktober 1951, yaitu saat diundangkannya UU No. 18 Tahun 1951 oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

B. Kondisi Umum Kabupaten Kulon Progo

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten dari lima kabupaten/kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di bagian barat. Batas Kabupaten Kulon Progo di sebelah timur yaitu Kabupaten

Bantul dan Kabupaten Sleman, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Purworejo, Propinsi Jawa Tengah dan di sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia. Kabupaten Kulon Progo memiliki topografi yang bervariasi dengan ketinggian antara 0 - 1000 meter di atas permukaan air laut, yang terbagi menjadi 3 wilayah meliputi:

a. Bagian Utara

Merupakan dataran tinggi/perbukitan Menoreh dengan ketinggian antara 500 sampai 1000 meter di atas permukaan air laut, meliputi Kecamatan Girimulyo, Kokap, Kalibawang, dan Samigaluh. Wilayah ini penggunaan tanah diperuntukan sebagai kawasan budidaya konservasi dan merupakan kawasan rawan bencana longsor.

b. Bagian Tengah

Merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 100 sampai 500 meter di atas permukaan air laut, meliputi Kecamatan Nanggulan, Sentolo, Pengasih, dan sebagian Lendah, wilayah dengan lereng antara 2 sampai 15%, tergolong berombak dan bergelombang merupakan peralihan dataran rendah dan perbukitan.

c. Bagian Selatan

Merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0 sampai 100 meter di atas permukaan air laut, meliputi Kecamatan Temon, Wates, Panjatan, Galur, dan sebagian Lendah. Berdasarkan kemiringan lahan, memiliki lereng 0,2% merupakan wilayah pantau sepanjang 24,9 km, apabila musim hujan merupakan kawasan rawan bencana banjir.

Luas wilayah Kabupaten Kulon Progo adalah 58.627,54 hektar, secara administratif terbagi menjadi 12 kecamatan yang meliputi 88 desa dan 930 dusun. Penggunaan tanah di Kabupetren Kulon progo, meliputi sawah 10.732,04 Ha (18,30%); tegalan 7.145,42 Ha (12,19%); kebun campur 31.131,81 (53,20%); perkampungan seluas 3.337,73 Ha (5,69%); hutan 1.025 Ha (1,75%); perkebunan rakyat 486 Ha (0,80%); tanah tandus 1.225 Ha (2,09%); waduk 197 Ha (0,34%); tambak 50 Ha (0,09%); dan tanah lain-lain seluas 3.315 Ha (5,65%) (Sumber : BAPPEDA).

C. Visi dan Misi Kabupaten Kulon Progo

Visi Kabupaten Kulon Progo adalah terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman, dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa. Sedangkan misi Kabupaten Kulon Progo yakni dirumuskan dalam enam misi pembangunan :

1. Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas tinggi dan berakhlak mulia melalui peningkatan kemandirian, kompetensi, ketrampilan, etoskerja, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan kualitas keagamaan.
2. Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip *clean government* dan *good governance*.
3. Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada pertanian dalam artitluas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan pelayanan infrastruktur wilayah.
5. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara optimal dan berkelanjutan.
6. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum.

D. Lambang, Logo, dan Semboyan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

Lambang, logo, dan semboyan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4

Lambang Pemkab Kulon Progo



Sumber : PPID Kulon Progo

Penjelasan lambang daerah Kabupaten Kulon Progo:

1. Bintang segi lima melambangkan falsafah Negara yakni Pancasila yang terdapat pada alinea VI Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Bundar bulat melambangkan segenap lapisan dan aliran masyarakat serta semua keyakinan dapat dipersatukan.
3. Lingkaran yang berbentuk rantai yang tidak terputus melambangkan semua keadaan di daerah Kabupaten Kulon Progo adalah untuk semua rakyat di daerah Kulon Progo pula.
4. Padi dan kapas melambangkan bahan makanan pokok dan sandang, sedangkan kelapa dan cengkeh menunjukkan daerah Kulon Progo mempunyai penghasilan yang spesifik untuk bahan perdagangan ekspor.
5. Garis tinggi rendah melambangkan daerah Kabupaten Kulon Progo terdiri dari daerah datar dan daerah pegunungan.
6. Coretan tiga buah melambangkan bahwa Kulon Progo mempunyai tiga sungai besar, yakni Sungai Progo, Sungai Serang, dan Sungai Bogowonto.
7. Lukisan *nyala juplak* (pelita tradisional) melambangkan jiwa dan semangat pantang mundur dan tidak dapat dimatikan oleh tiupan angin dari segala penjuru.

Sedangkan Logo Kabupaten Kulon Progo **BINANGUN** digambarkan sebagai berikut :

Gambar 5
Logo Kabupaten Kulon Progo Binangun



Sumber : PPID Kulon Progo

B → **BERIMAN**
I → **INDAH**
N → **NUHONI**
A → **AMAN**
N → **NALAR**
G → **GUYUB**
U → **ULET**
N → **NYAMAN**

Makna Logo Kabupaten Kulon Progo Binangun:

A. Segi Bentuk

1. Secara keseluruhan bentuk Logo adalah gambar Gunungan dari dunia wayang kulit. Dalam dunia wayang, gunungan menggambarkan isi dari alam semesta/jagad/alam raya, baik manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan segala budayanya, yang merupakan wujud, cipta, rasa, karsa, dan karya manusia. Gunungan digerakkan oleh dalang pada awal, pergantian episode maupun akhir cerita.
2. Dalam logo, bentuk gambar Gunungan di isi dengan:
 - a. Gambar bunga warna kuning berjumlah delapan Gambar ini merupakan delapan unsur dari motto BINANGUN yaitu: Beriman, Indah, Nuhoni, Aman, Nalar, Guyub, Ulet, dan Nyaman.
 - b. Gambar kelopak daun berjumlah lima berwarna hijau Gambar ini merupakan simbolisasi dari sila lima Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia.

- c. Tulisan Kulon Progo Binangun pada wadah kelopak daun yang berwarna kuning dan warna tulisan hitam.

B. Segi Warna

1. Kuning : Kemuliaan dan keagungan.
2. Hijau : Kesuburan, kemakmuran, dan kesejahteraan.
3. Hitam : Kesungguhan, kemantapan, dan ketenangan.

Logo didominasi warna hijau dan kuning, sesuai dengan rontek Kabupaten Kulon Progo yakni, Pare Anom.

C. Makna Menyeluruh (Logo dan Semboyan)

Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam membangun daerahnya, bertujuan agar menjadi lebih maju, makmur, sejahtera lahir batin (Gunungan warna hijau dan kuning). Tujuan pembangunan dan cara mencapainya bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 (Kelopak daun lima buah dan wadahnya).

Beriman dan bertaqwa adalah landasan masyarakat Kabupaten Kulon Progo. Dalam membangun, maka segala kondisi dan potensi yang ada, akan dikelola, dilestarikan, dan ditata secara serasi, selaras, dan seimbang, sehingga terwujud tata hubungan yang harmonis,

berkesinambungan, indah, serta menimbulkan rasa dan suasana yang nyaman dan aman lahir dan batin serta tentram.

Kemajuan dan kesejahteraan lahir dan batin hanya dapat terwujud bila keseluruhan masyarakat Kulon Progo Nuhoni (mentaati) segala peraturan agama, aturan masyarakat, dan aturan kehidupan alam yang telah ditetapkan oleh Allah, dengan sungguh-sungguh. Mengingat adanya berbagai sumber daya alam, sumber daya manusia, dan lajunya perkembangan iptek, maka untuk keberhasilan pembangunan, masyarakat Kulon Progo haruslah menjaga persatuan, kesatuan, meningkatkan kegotongroyongan, guyub dan rukun. Berbagai hambatan haruslah dijadikan tantangan dan dihadapi dengan semangat tinggi, tekad, yang kuat, ulet serta menggunakan nalar (delapan helai bunga warna kuning). Maka dengan penuh kesanggupan dan keyakinan yang mantap, Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo akan membangun Kulon Progo yang maju, makmur, dan sejahtera dengan jiwa, semangat, dan tekad Kulon Progo Binangun.

Adapun makna semboyan **BINANGUN** adalah sebagai berikut:

B = BERIMAN

Masyarakat Kulon Progo adalah insan pembangunan yang mempunyai keyakinan teguh dan percaya kepada tuhan yang maha esa.

I = INDAH

Kondisi, potensi, dan lingkungan yang ditata secara asri dan harmonis untuk mewujudkan keindahan.

N = NUHONI

Aturan-aturan agama, hukum dan sosial pada setiap gerak dan langkahnya dalam kehidupan masyarakat di Kulon Progo.

A = AMAN

Suasan tenang lahir dan batin akan menjamin kelangsungan pembangunan di wilayah Kabupaten Kulon Progo.

N = NALAR

Mengingat berbagai keterbatasan, masyarakat, dan aparat Kulon Progo dalam melaksanakan pembangunan selalu didasar dengan pertimbangan dan perhitungan yang matang.

G = GUYUB

Masyarakat Kulon Progo bersama-sama, bekerjasama tolong menolong berusaha membantu dalam melaksanakan pembangunan.

U = ULET

Masyarakat dan aparat Kulon Progo adalah masyarakat dan aparat yang tekun dan tidak mudah putus asa, serta ulet dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang.

N = NYAMAN

Terciptanya lingkungan yang serasi, bersih harmonis dan menyejukkan akan membina suasana Kulon Progo yang menyenangkan dan membahagiakan.

E. Bagian Teknologi Informasi dan Humas Pemkab Kulon Progo

Humas Pemkab Kulon Progo berkantor di Media Center tepatnya di Jalan Tamtama No. 3 Wates Kulon Progo. Gedung Media Center ini juga sekaligus dipakai saat adanya Konferensi Pers dengan wartawan. Humas dalam melaksanakan tugasnya bekerja sama dengan bagian Teknologi Informatika. Pekerjaan Humas yang dilaksanakan lingkupnya lebih dalam hal

membangun relasi yang lebih baik dengan masyarakat. Humas Pemkab Kulon Progo berfungsi sebagai pengembangan komunikasi, informasi dan media massa. Kegiatan yang dilakukan yakni kerjasama dan fasilitas jurnalistik bagi pers dan masyarakat pencari informasi. Digunakan untuk menjamin kelancaran arus informasi kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2008 tentang uraian tugas pada unsur organisasi sub bagian-sub bagian pada bagian Sekretariat Daerah (Setda) dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Setda DPRD).

Kegiatan yang dilakukan Humas Pemkab Kulon Progo yakni penyelenggaraan *Media Center*, *Media Pers*, *Press Relations*, *Human Relations*, Konferensi Pers, Liputan, Pembuatan *Release*, Siaran Keliling, dan Pameran.

1. Media Center

Merupakan tempat yang digunakan oleh Humas untuk mengadakan *Press Conference* (konferensi pers) dengan wartawan, saat menyikapi berbagai isu/permasalahan yang membutuhkan keterangan dari Humas Pemkab Kulon Progo.

2. Media Pers (Press)

Media ini terdiri dari berbagai macam surat kabar yang beredar dimasyarakat, hal-hal yang menyangkut pemerintahan.

3. *Press Relations*

Mengatur dan memelihara hubungan dengan pers umumnya dengan media massa seperti radio, televisi, koran, dan lain-lain.

4. *Human Relations*

Memelihara hubungan khusus antara manajemen dengan karyawan dalam hal kepegawaian secara formal, misalnya pembantuan dalam acara yang dilakukan oleh bidang lain.

5. *Konferensi Pers*

Mengumpulkan wartawan dan memberikan informasi serta penjelasan dan memberikan kesempatan kepada pers untuk menanyakan hal-hal yang hubungannya dengan kegiatan yang dilakukan Pemkab Kulon Progo.

6. *Liputan*

Meliput kegiatan masyarakat yang dilakukan untuk mendokumentasikan, menyiarkan atau menyebarluaskan kembali agar orang lain tahu tentang kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Kulon Progo.

7. *Pembuatan Release*

Pembuatan *release* yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan, *release* dipublikasikan melalui *website* resmi Pemkab Kulon Progo.

8. Siaran Keliling

Digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan yang akan dilakukan dan promosi.

9. Pameran

Penyelenggaraan dan pengaturan barang-barang untuk dipertunjukkan mutunya, keindahannya, dan teknik pembuatannya dengan maksud menarik publik atau umum.

F. Pusat Pelayanan Informasi dan Aduan Masyarakat PPID Kabupaten Kulon Progo

Pusat Pelayanan Informasi dan Aduan Masyarakat PPID Kabupaten Kulon Progo dibentuk pada September 2013. Pembentukan ini untuk melaksanakan UU KIP No 14 Tahun 2008 sebagai upaya transparansi informasi kepada publik. Kemudian adanya SK Bupati No 215 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Kulon Progo, maka Humas Pemkab Kulon Progo dalam hal ini membuat tim pelaksana PPID dengan menunjuk Heri Widada, SIP selaku Kepala Sub Bagian Data dan Informasi Bagian TI dan Humas Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kulon Progo sebagai pemimpin kegiatan. Sementara penanggung jawab diampu oleh Humas Pemkab Kulon Progo sendiri, yakni Rudy Widiyatmoko, S.Sos.

Sebagai badan publik, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah membentuk PPID beserta 47 PPID pembantu yang berada di tiap SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, dengan Surat Keputusan Bupati Kulon Progo No. 243 Tahun 2011 tertanggal 12 Juli 2011. Dalam melaksanakan tugasnya PPID bertanggung jawab langsung kepada Ketua KIP DIY.

Dalam pelaksanaan kegiatannya, PPID Kabupaten Kulon Progo selain memberikan pelayanan permohonan informasi, juga melakukan pelayanan terhadap aduan/saran/kritik/usulan dari masyarakat, sehingga semakin menambah fungsi/peran PPID Kulon Progo, dengan harapan menjadikan pelayanan informasi dan aduan masyarakat semakin sederhana, cepat, dan murah.

PPID Kabupaten Kulon Progo memiliki empat unit pelayanan yang dihasilkan dalam pembentukan tim pelaksana sesuai Surat Keputusan Humas Pemkab Kulon Progo, yakni :

1. Unit Pelayanan

Yakni unit yang memegang peran dalam pemberian pelayanan kepada publik diluar pelayanan aduan dan sengketa informasi. Karena tugas PPID bukan hanya memberikan pelayanan aduan masyarakat, namun lebih jauh juga memberikan pelayanan dalam bentuk lain baik kepada

masyarakat maupun pembantuan kepada dinas lain yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Misalnya permintaan bantuan untuk dokumentasi acara atau kegiatan pada Dinas atau SKPD lainnya, juga pelayanan permintaan informasi bagi masyarakat yang membutuhkan.

2. Unit Pelayanan Aduan dan Sengketa Informasi

Yakni unit yang menangani pelayanan aduan dari masyarakat dan pelayanan permasalahan sengketa informasi. Masyarakat saat ini dapat mengadukan aduannya langsung kepada PPID pembantu maupun kepada PPID Kulon Progo dengan berbagai media yang tersedia seperti meja layanan langsung, SMS *center*, telepon, *email* PPID Kulon Progo, *website* PPID Kulon Progo, *email* dan *website* pada PPID pembantu di tiap SKPD, *website* Pemkab Kulon Progo.

3. Unit Pengolahan Data dan Dokumentasi

Yakni unit yang menangani kegiatan pengolahan data dan dokumentasi yang bersumber dari seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Mula-mula data dikumpulkan dari seluruh SKPD yang ada, kemudian diklasifikasikan terhadap jenis atau nilai data, kemudian disimpan dalam *database* sebagai hasil akhir yang disediakan apabila ada

masyarakat yang membutuhkan informasi. Hal serupa juga berlaku pada pengolahan dokumentasi. Data dan dokumentasi ini penting selain untuk pelayanan juga untuk pembuatan majalah dan buletin yang rutin dikeluarkan oleh Humas.

4. Unit Pengelolaan Teknologi Informasi.

Yakni unit yang menangani pengelolaan teknologi informasi. Unit ini lebih fokus pada peremajaan dan peningkatan teknologi informasi yang digunakan PPID Kulon Progo dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Ringkasnya unit ini menangani sarana dan prasarana teknologi yang ada.

Tugas tim pelaksana PPID sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kepala Bagian TI dan Humas Setda Kulon Progo, diantaranya:

1. Pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu.
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi publik, dan pelayanan sengketa serta aduan.
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik.
4. Menyiapkan penyiapan bahan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan.

5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi.
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
7. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Sampai saat ini PPID telah mengembangkan beberapa media yang dapat digunakan masyarakat untuk melaporkan aduan, diantaranya SMS *center* (08112554010), telepon/faksimili (0274-773208), meja layanan langsung di kantor Bagian TI dan Humas Jalan Tamtama No. 3 Wates, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, *email* (ppid.kulonprogokab.go.id), *website* (www.ppid.kulonprogokab.go.id), semua *website* dan *email* resmi SKPD, *website* Kabupaten Kulon Progo (www.kulonprogokab.go.id).

Dalam aplikasinya, PPID melaksanakan permintaan informasi publik dan pelayanan aduan masyarakat yang masing-masing dapat disalurkan melalui beragam media seperti tersebut diatas. Segala pelayanan publik harus diselenggarakan sesuai dengan mekanisme yang tercantum dalam *Standar Operational Procedure* (SOP) PPID Kulon Progo. Dalam pelayanan permintaan informasi publik terdiri atas informasi publik terbuka dan tertutup. Informasi publik terbuka diklasifikasikan menjadi informasi diumumkan dan disediakan berkala, informasi diumumkan serta merta, informasi tersedia setiap saat, dan informasi berdasarkan permintaan. Sementara informasi

publik tertutup diklasifikasikan menjadi informasi rahasia negara, rahasia pribadi, rahasia bisnis.

Dalam permintaan informasi publik harus disetujui oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi (TP2I) yang terdiri dari Asisten Administrasi Perekonomian dan SDA, Inspektorat, dan Bagian Hukum dengan dikabulkannya permintaan informasi melalui atasan PPID yakni Sekretariat Daerah. Lama waktu permintaan yang diberikan maksimal sepuluh hari kerja ditambah tujuh hari kerja jika pemohon melakukan pernyataan kurang puas.

Sedangkan layanan aduan dapat disalurkan melalui media tersebut di atas dengan batas waktu yang diberikan maksimal empat belas hari kerja sejak aduan dilayangkan. Apabila masyarakat merasa tidak puas maka dapat mengajukan keberatan dengan mengisi formulir yang disediakan dengan batas maksimal waktu tiga puluh hari kerja sejak pengajuan keberatan dilayangkan. Layanan aduan dari masyarakat akan masuk ke PPID Kulon Progo kemudian di indentifikasikan oleh petugas PPID untuk dikategorikan ke SKPD mana tujuan aduan. Tahap pengkategorian ini dilanjutkan dengan pencatatan ke dalam buku laporan aduan untuk rekap dokumentasi dan bahan penyusunan laporan. Selanjutnya masuk ke *database* PPID Kulon Progo. Kemudian diteruskan kepada SKPD yang dimaksud sesuai tujuan aduan yang dalam hal ini diterima oleh petugas PPID pembantu untuk dicatat dan diberi respon setelah berkoordinasi.

Terdapat sebanyak 47 SKPD yang ada di Kabupaten Kulon Progo yang terdiri dari dinas, unit, kantor, kecamatan, rumah sakit, dan sebagainya.

SKPD tersebut diantaranya:

1. Sekretariat DPRD
2. Inspektorat Daerah
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
4. Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7. Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan
8. Dinas Pertanian dan Kehutanan
9. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
10. Dinas Pekerjaan Umum
11. Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
12. Dinas Pendidikan
13. Dinas Koperasi dan UMKM
14. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
15. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
16. Dinas Kesehatan
17. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
18. Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDM

19. RSUD Wates
20. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
21. Kantor Ketahanan Pangan Penyuluhan Pertanian Perikanan
Kehutanan
22. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
23. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
24. Kantor Lingkungan Hidup
25. Satuan Polisi Pamong Praja
26. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
27. Bagian Administrasi Kesejahteraan Masyarakat
28. Bagian Hukum
29. Bagian Administrasi Pembangunan
30. Bagian Administrasi Perekonomian
31. Bagian Teknologi Informasi dan Hubungan Masyarakat
32. Bagian Keuangan
33. Bagian Umum
34. Bagian Organisasi
35. Kecamatan Galur
36. Kecamatan Lendah
37. Kecamatan Panjatan
38. Kecamatan Wates
39. Kecamatan Kokap

40. Kecamatan Nanggulan
41. Kecamatan Kalibawang
42. Kecamatan Girimulyo
43. Kecamatan Pengasih
44. Kecamatan Sentolo
45. Kecamatan Samigaluh
46. Kecamatan Temon
47. Kelurahan Wates

BAB III

PEMBAHASAN

A. Konflik Yang Terjadi di Kecamatan Temon Terkait Rencana Pembangunan Bandara Internasional

Konflik yang terjadi di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, terkait rencana pembangunan Bandara Internasional merupakan konflik sosial antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah, dan masyarakat dengan PT. Angkasa Pura I (Persero). Konflik muncul setelah rencana pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon menyeruak dikalangan masyarakat. Konflik semakin memanas ketika pejabat Desa Glagah tidak bisa memenuhi keinginan warganya untuk mendukung menolak rencana pembangunan Bandara Internasional yang akan dibangun di Kecamatan Temon. Warga yang tergabung dalam kelompok WTT ricuh dan mengamuk serta melakukan aksi penyegelan Balai Desa Glagah sebagai bentuk luapan emosi dan kekecewaan warga terhadap pejabat Desa setempat.

Nah ini warga ini karena merasa Bapak nya adalah Kepala Desa, Pak Kades mohon bahwa saya orang-orang WTT seperti itu ya sampaikan kepada Pak Bupati bahwa orang-orang WTT ini menolak! Terus Pak Kades nya kayaknya karena itu banyak anu ya saya juga tidak di dalamnya saya diluar kemudian itu Pak Kades nya masuk diruangan itu karena mungkin beristirahat. Pas waktu itu Pak Kades malah

meninggalkan tempat, sehingga terjadi penyegelan, itu emosi masyarakat itu. (Bapak Suhadi, Penolak Bandara, wawancara 13 November 2014).

Gambar 6

Penyegelan Balai Desa Glagah



Sumber data: PPID Kulon Progo

Faktor komunikasi menjadi pemicu awal mulanya konflik terjadi, komunikasi yang tidak efektif menimbulkan persepsi negatif dimata warga.

Komunikasi, jadi masyarakat tidak menerima informasi secara utuh lebih ke informasi dari pihak-pihak yang sebenarnya tidak berkaitan langsung sehingga mereka mengalami kebingungan karena mendapat informasi yang tidak pasti. Ketegangan antara lain masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan pihak pengelola Bandara Angkas Pura sendiri. (Bapak Isman, Staff Humas Pemkab Kulon Progo, wawancara 13 November 2014).

Wawancara dengan Bapak Suhadi, Penolak Bandara:

Ya belum ada kejelasan, warga masyarakatnya minta penjelasan yang sekiranya berkaitan dengan program pembangunan Bandara sebagai pembangunan Bandara baru di DIY, kan gitu ya. (Bapak Suhadi, Penolak Bandara, wawancara 13 November 2014).

Warga yang tergabung dalam kelompok WTT, sebagai kelompok masyarakat yang kontra terhadap pembangunan Bandara, menuntut pemerintah untuk membatalkan rencana pembangunan Bandara Internasional. Warga yang kontra memasang spanduk, papan, dan *tampah* yang berluliskan ancaman dan kritikan-kritikan yang ditujukan kepada Pemkab Kulon Progo dan PT. Angkasa Pura I (Persero) di sepanjang Jalan Glagah Kecamatan Temon. Penolakan pendirian Bandara Internasional di Kecamatan Temon disebabkan warga resah dan takut rumah serta sumber penghidupannya hilang akibat pembangunan Bandara. Pasalnya, lokasi yang akan dijadikan mega proyek Bandara adalah tanah pertanian yang subur dan produktif.

Gambar 7

Papan Penolakan Warga



Sumber data: Hasil Observasi Peneliti di Lapangan

Rendahnya Sumber Daya Manusia membuat warga mudah untuk dipengaruhi dan diprofokasi oleh pihak-pihak luar untuk menolak rencana pembangunan Bandara Internasional yang akan dibangun di Kecamatan Tembung. Masyarakat sangat *sensitive* karena permasalahan ini menyangkut lahan dan tanah pertanian mereka. Warga menganggap dengan adanya Bandara hanya akan bikin sengsara kaum petani.

Sifat penolakan itu sebetulnya pada awalnya masyarakat yang emang SDM nya rendah selalu diprofokasi oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Mereka orang yang berkepentingan selalu membangkang dan menghasut sehingga mereka emang kurang pengertiannya sehingga mereka sangat mudah untuk dibakar amarah. (Bapak Agus, Kepala Desa Glagah, wawancara 11 November 2014).

Akibat konflik yang terjadi di Kecamatan Temon terkait rencana pembangunan Bandara Internasional membawa dampak yang buruk, yaitu timbulnya krisis sosial ditengah-tengah masyarakat. Masyarakat yang netral, pro, maupun kontra saling bermusuhan, terjadi ketegangan-ketegangan dan keresahan antar warga masyarakat, serta putusya komunikasi diantara mereka.

Pihak-pihak yang kontra ini sering, misalkan memberikan sanksi sosial dimasyarakat, misalkan ada kenduren, ada layatan, itu sering apa namanya memboikot tidak berangkat. (Bapak Agus, Kepala Desa Glagah, wawancara 11 November 2014).

Wawancara dengan Bapak Isman, Staff Humas Pemkab Kulon Progo:

Itu WTT kalau misal ada masyarakat yang setuju dengan Bandara relatif menghilangkan kontak seperti itu, kalau ada acara itu tidak diundang, kalau ada yang meninggal itu tidak dilayati gitu. (Bapak Isman, Staff Humas Pemkab Kulon Progo, wawancara 13 November 2014).

Adanya penolakan tersebut sampai saat ini pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon belum bisa dimulai dan terancam molor dari jadwal yang telah ditargetkan yaitu pada awal tahun 2015.

Ya molor tentunya kalo ditolak-tolak terus ya pasti molor. Tapi ini adalah tanggung jawab dari Pemkab. (Andhika, Humas PT. Angkasa Pura I (Persero) Yogyakarta, wawancara 12 Juni 2014).

Konflik yang terjadi di Kecamatan Temon, merupakan tanggung jawab Pemkab Kulon Progo. Pemkab Kulon Progo selaku pihak yang berwenang dan bertanggung jawab dalam konflik terkait rencana

pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon. Hal ini diutarakan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Humas PT. Angkasa Pura I (Persero) Yogyakarta sebagai berikut:

Pihak yang berwenang untuk menyelesaikan masalah ini adalah Pemkab Kulon Progo. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak akan ikut campur dengan penolakan warga tersebut. Kami meyakini Pemkab Kulon Progo masih mampu menyelesaikan pertentangan warga tersebut. Pemerintah Provinsi akan mengambil alih penanganan masalah ini jika Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sudah tidak sanggup lagi menangani penolakan warganya. (Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur DIY, Koransindo.com 14 Januari 2014).

Wawancara dengan Humas PT. Angkasa Pura I (Persero) Yogyakarta:

Pihak yang bertanggung jawab menangani konflik terkait rencana pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, merupakan tanggung jawab Pemkab Kulon Progo. PT. Angkasa Pura I (Persero) hanya bertanggung jawab mengganti ganti rugi warga yang terkena dampak mega proyek saja. (Andhika, Humas PT. Angkasa Pura I (Persero) Yogyakarta, wawancara 12 Juni 2014).

Dari hasil penuturan kedua informan tersebut peneliti menganalisis, bahwa Pemkab Kulon Progo merupakan pihak yang bertanggung jawab menangani konflik yang terjadi di daerahnya. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menilai pihak Pemkab Kulon Progo masih mampu menangani permasalahan yang terjadi di Kecamatan Temon terkait rencana pembangunan Bandara Internasional. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta akan turun langsung menangani konflik jika pihak Pemkab Kulon Progo sudah tidak bisa menangani konflik yang terjadi. Sampai saat ini Pemkab Kulon Progo masih

sanggup menangani konflik yang terjadi di Kecamatan Temon, karena ini merupakan tanggung jawab Pemkab untuk merukunkan warganya terkait konflik rencana pembangunan Bandara Internasional yang akan dibangun di wilayah Kabupaten Kulon Progo.

PT. Angkasa Pura I (Persero) tidak turun langsung menangani konflik yang terjadi di Kecamatan Temon, hal ini dikarenakan pembangunan Bandara merupakan proyek Pemerintah Pusat melalui BUMN yaitu Angkasa Pura I (Persero). Hasil analisis peneliti juga dikuatkan oleh penuturan informan-informan sebagai berikut:

Pihak PT. Angkasa Pura kalo masalah konflik tidak turun langsung, karena ini adalah proyek pusat, negara! Proyek negara tidak bisa ditangani oleh satu pihak sendiri misalnya dalam hal ini Angkasa Pura. (Bapak Isman, Staff Humas Pemkab Kulon Progo, wawancara 13 November 2014).

Wawancara dengan Bapak Agus, Kepala Desa Glagah:

Sebetulnya program Bandara ini kan program dari pemerintah pusat dan juga program pemerintah lewat BUMN Angkasa Pura I. Sehingga memang tempat fasilitas umum seperti terminal, lapangan udara, dermaga, itu kan sudah di atur dalam undang-undang nomor 2 Tahun 2012. (Bapak Agus, Kepala Desa Glagah, wawancara 11 November 2014).

Wawancara dengan Andhika, Humas PT. Angkasa Pura I (Persero) Yogyakarta:

PT. Angkasa Pura hanya menjalankan perintah dari pemerintah pusat untuk membangun Bandara. Kalau masalah yang menangani konflik, pembebasan lahan, itu tanggung jawab pemerintah, baik itu Pemda maupun Pemkab. (Andhika, Humas PT. Angkasa Pura I (Persero) Yogyakarta.

Dengan dikeluarkannya Inpres No. 2 Tahun 2013 tentang penanganan keamanan dalam negeri, maka semua Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan berperan untuk melakukan penanganan masalah gangguan keamanan yang ada diwilayah masing-masing. Gangguan keamanan ini bisa dalam bentuk bentrok antar warga, konflik sosial, pertikaian masalah SARA, masalah lahan, masalah sumber daya alam, masalah batas wilayah pemekaran dan lainnya yang kemungkinan disebabkan kebijakan daerah, seperti dikeluarkannya surat ijin tanah, ijin tambang, dan sebagainya tidak boleh dibiarkan harus diselesaikan dan dicari akar masalahnya. (Sumber data: *polkam.go.id* diakses 07/12/2014 pukul 12.47 WIB).

Sesuai dengan Inpres No. 2 Tahun 2013 tentang penanganan keamanan dalam negeri, maka Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menjalankan Inpres tersebut. Pemkab Kulon Progo berperan menangani konflik sosial yang terjadi di wilayahnya terkait rencana pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode Deskriptif Kualitatif, dengan menganalisa hasil dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dari penelitian yang sudah peneliti lakukan di Pemkab Kulon Progo. Di dalam bab ini peneliti akan memaparkan landasan-landasan teori yang akan menjadi acuan penelitian, diantaranya adalah:

1. Tahapan Konflik Yang Terjadi di Kecamatan Temon Terkait Rencana Pembangunan Bandara Internasional

Konflik berubah setiap saat melalui berbagai tahap aktivitas, intensitas, ketegangan, dan kekerasan yang berbeda. Pada tahapan ini peneliti menganalisis tahapan-tahapan konflik yang terjadi di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, terkait rencana pembangunan Bandara Internasional berdasarkan data yang peneliti peroleh dilapangan. Tahapan konflik sangatlah penting untuk diketahui guna mengetahui kondisi konflik yang terjadi saat ini. Seperti yang diungkapkan Simon Fisher, dkk (2001: 19) dalam bukunya yang berjudul “*Mengelola Konflik, Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*” analisis dasar tahapan konflik terdiri dari lima tahap, yang umumnya disajikan secara berurutan diantaranya: Prakonflik, Konfrontasi, Krisis, Akibat, dan Pascakonflik.

a. Prakonflik

Prakonflik yang terjadi terkait rencana pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, yaitu disebabkan oleh faktor komunikasi, terdapat ketidaksesuaian informasi yang didapat oleh warga masyarakat serta adanya unsur profokasi dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Komunikasi, jadi masyarakat tidak menerima informasi secara utuh lebih ke informasi dari pihak-pihak yang sebenarnya tidak berkaitan langsung sehingga mereka mengalami kebingungan karena mendapat informasi yang tidak pasti. Jadi mereka ini sebenarnya nanti seperti apa gitu mereka masih bingung. Kalo ketegangan itu saya kira ada juga antara lain masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan pihak pengelola Bandara Angkasa Pura sendiri. (Bapak Isman, Staff Humas Pemkab Kulon Progo, wawancara 13 November 2014).

Wawancara dengan Bapak Suhadi, Penolak Bandara, sebagai berikut:

Yaaa belum ada kejelasan, warga masyarakatnya minta penjelasan yang sekiranya berkaitan dengan program pembangunan Bandara sebagai pengembangan Bandara baru di DIY kan gitu ya. (Bapak Suhadi, Penolak Bandara, wawancara 13 November 2014).

Berdasarkan hasil penuturan tersebut, peneliti mengalisis bahwa Prakonflik yang terjadi terkait rencana pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, disebabkan Warga tidak memahami dampak positif dari pembangunan Bandara tersebut. Hal ini dikarenakan warga tidak mendapatkan informasi secara utuh dari pemerintah mengenai rencana pembangunan Bandara. Komunikasi yang tidak efektif menimbulkan persepsi negatif dimata warga. Hal senada juga diungkapkan oleh Agus M. Hardjana (1994: 24) apapun alasanya, komunikasi yang gagal membuat isi berita atas pesan tidak lengkap dan tidak jelas, lengkap dan jelas tetapi tidak sampai pada si penerima tidak baik dan tepat pada waktunya, sampai dengan baik dan tepat pada waktunya tetapi tidak diterima dan ditangkap utuh. Karena itu

hasilnya adalah salah pengertian dan salah paham, dan itu menyebabkan konflik. Sumber Daya Manusia yang rendah membuat warga masyarakat lebih mudah untuk dipengaruhi dan difokusi oleh pihak luar untuk menolak rencana pembangunan Bandara di Kecamatan Temon tersebut.

Hasil analisis peneliti juga diperkuat oleh penuturan Kepala Desa Glagah sebagai berikut:

Sifat penolakan itu sebetulnya pada awalnya masyarakat yang emang SDM nya rendah selalu difokusi oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi yang berkembang di masyarakat tentunya ada yang pro maupun netral itu selama ini diam. Tetapi pihak-pihak yang kontra ini sering misalkan memberikan sanksi sosial dimasyarakat, misalkan ada kenduren, ada layatan, itu sering apa namanya memboikot tidak berangkat. (Bapak Agus, Kepala Desa Glagah, wawancara 11 November 2014).

Wawancara dengan Bapak Isman, Staff Humas Pemkab Kulon Progo:

Untuk mengakhiri kontak satu sama lain ini lebih ke WTT sendiri, jadi mereka kalau ada masyarakat dengan masyarakat ya, itu WTT kalau misal ada masyarakat yang setuju dengan Bandara mereka relatif menghilangkan kontak seperti itu, kalau ada acara itu tidak diundang, kalau ada yang meninggal itu tidak dilayati gitu. (Bapak Isman, Staff Humas Pemkab Kulon Progo, wawancara 13 November 2014).

Dari penjelasan informan tersebut peneliti menganalisis bahwa warga yang menolak/kontra terhadap rencana pembangunan Bandara memberikan sanksi-sanksi sosial kepada warga yang mendukung/pro terhadap rencana pembangunan Bandara. Seperti yang diungkapkan salah satu informan tersebut bahwa ketidaksetujuan warga awalnya adalah

profokasi, hal ini menunjukkan bahwa warga yang menolak Bandara mendapatkan informasi dari pihak luar. Disinilah timbul ketegangan-ketegangan dan konflik sosial antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah, dan masyarakat dengan PT. Angkasa Pura I (Persero).

b. Konfrontasi

Pada tahap Konfrontasi, konflik terkait rencana pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, semakin menyeruak dikalangan masyarakat. Konflik pun semakin memanas ketika Pejabat Desa Glagah tidak bisa memenuhi keinginan warganya untuk mendukung menolak pembangunan Bandara. Warga yang tergabung dalam kelompok WTT pun ricuh dan mengamuk serta melakukan aksi penyegelan Balai Desa Glagah. Hasil analisis peneliti juga diperkuat oleh penuturan informan yang menolak rencana pembangunan Bandara, antara lain sebagai berikut:

Nah ini warga ini karena merasa Bapak nya adalah Kepala Desa, Pak Kades mohon bahwa saya orang-orang WTT seperti itu ya sampaikan kepada Pak Bupati bahwa orang-orang WTT ini menolak! Terus Pak Kades nya kayaknya karena itu banyak anu ya saya juga tidak di dalamnya saya diluar kemudian itu Pak Kades nya masuk dikamar diruangan itu karena mungkin beristirahat. Pas waktu itu Pak Kades malah meninggalkan tempat, sehingga terjadi penyegelan, itu emosi masyarakat itu. (Bapak Suhadi, Penolak Bandara, wawancara 13 November 2014).

Hasil penuturan informan diatas juga diperkuat oleh penuturan Kepala Desa Glagah.

Terkait penyegelan Balai Desa yang dilakukan oleh kelompok yang kontra selama ini euh...sudah ditangani keranah hukum. Pihak kepolisian sudah melakukan penyelidikan, selama ini ada 7 terduga yang mengakibatkan pelayanan publik terhambat. (Bapak Agus, Kepala Desa Glagah, wawancara 11 November 2014).

Aksi penyegelan dan pengrusakan Balai Desa Glagah yang dilakukan oleh kelompok WTT sebagai kelompok yang kontra terhadap rencana pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon, mengakibatkan pelayanan publik terganggu. Aksi demonstrasi dan ketegangan-ketegangan antara warga masyarakat dengan pemerintah terjadi saat berlangsungnya sosialisasi rencana pembangunan Bandara Internasional baru di Kecamatan Temon. Masa memblokir akses jalan raya di sepanjang jalan Glagah. Aksi penolakan warga merupakan bentuk luapan emosi warga, warga merasa di anak tirikan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, maupun Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Suara penolakan warga yang tidak ditanggapi oleh pemerintah baik oleh Pemkab Kulon Progo maupun Pemda DIY membuat warga kesal dan emosi, sehingga warga turun ke jalan untuk melakukan aksi demonstrasi dan memblokir akses jalan di sepanjang jalan Glagah untuk menolak rencana pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon.

Gambar 8

Warga Penolak Bandara Memblokir Jalan Raya



Sumber Data: PPID Kulon Progo

c. Krisis

Konflik terkait rencana pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, juga mengakibatkan krisis, yaitu krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Komunikasi antara kedua belah pihak pun terputus dan cenderung menuduh serta menentang pemerintah. Masyarakat yang menolak rencana pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon tidak mempercayai hal-hal

yang disampaikan oleh Pemkab Kulon Progo maupun PT. Angkasa Pura I (Persero).

Hasil analisis peneliti ini juga didukung oleh penuturan informan sebagai berikut:

Kalo krisis kepercayaan ia bagi orang yang menolak Bandara. Mereka menganggap bahwa ini tuh tidak menyuarakan suara mereka dan pertanyaan-pertanyaan umum yang cenderung menuduh dan menentang pihak lainnya ya pasti ada lah karena tidak ada dasar ketidaksukaan terhadap proyek ituuu...mereka ya seperti yang lainnya bahwa setiap ketidaksukaan masyarakat terhadap sesuatu hal yang dianggap di prakasai oleh Pemerintah, maka yang disalahkan adalah Pemerintah, itu sudah sangat umum. Kalo pertanyaan pasti ada misalnya apakah itu ada kongkalikong? Iya toh...pasti mereka bertanya seperti itu, walaupun sebenarnya tidak ada pun mereka akan seperti itu. Kalau ada kah pertanyaan-pertanyaan memang ada! Menuduh iya! Dan menentang juga iya! Ada kata-kata kasar, kalau zaman sekarang istilahnya di bully. (Bapak Isman, Staff Humas Pemkab Kulon Progo, wawancara 13 November 2014).

Hasil penuturan informan tersebut diperkuat oleh penuturan warga yang menolak rencana pembangunan Bandara, yaitu:

Warga masyarakat yang menolak tidak percaya dengan Pemerintah seperti itu. (Bapak Suhadi, Penolak Bandara, wawancara 13 November 2014).

Dari hasil penuturan kedua informan tersebut bahwa benar konflik terkait rencana pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, mengakibatkan krisis, yaitu krisis sosial. Masyarakat yang menolak rencana pembangunan Bandara lebih

percaya kepada pihak luar sehingga mudah untuk dipengaruhi dan diprofokasi.

Jadi selama ini kan sebetulnya krisis kepercayaan itu bukan tidak ada tetapi profokasi yang selalu berjalan melalui profokatorrr, itu selalu membuat eumm, supaya masyarakat tidak percaya dengan pemerintah. (Bapak Agus, Kepala Desa Glagah, wawancara 11 November 2014).

Berdasarkan hasil penuturan informan tersebut peneliti menganalisis bahwa benar ada krisis kepercayaan yang ditimbulkan oleh konflik terkait rencana pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon, yaitu krisis kepercayaan warga masyarakat yang kontra terhadap pemerintah. Padahal pemerintah tidak akan merugikan masyarakatnya, pemerintah akan berusaha dan berupaya meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian dari pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon tersebut.

d. Akibat

Akibat yang ditimbulkan dari konflik terkait rencana pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, yaitu krisis sosial. Masyarakat yang pro dan kontra saling bermusuhan, keresahan warga, penyegelan Balai Desa, pemblokadean jalan raya, dan lain-lain.

Akibat yang di timbulkan dari konflik banyak! Dari sisi sosial masyarakat tidak terjadi kedamaian, itu sudah hilang kedamaiannya. Terus lebih ke hubungan antara masyarakat dengan masyarakat, kalau masyarakat dengan Pemerintah kita tidak terlalu bermasalah ya,,karena dari pihak Pemkab sendiri merasa bahwa seluruh masyarakat adalah tanggung jawab Pemkab baik pro maupun kontra tetap dilayani sebagaimana mestinya. Jadi tidak ada kita menyerah..woh sudah gak peduli itu tidak! Tetap diurus sebagaimana porsinya masing-masing. Lalu peyegelan Balai Desa Glagah yang dilakukan warga sebenarnya itu merugikan merugikan mereka sendiri karena warga yang lain malah menjadi terganggu pelayanannya, dan itu pun sudah menjadi urusan yang berwajib karena itu masalahnya sudah berbeda bukan urusan dari Pemkab itu sendiri. (Bapak Isman, Staff Humas Pemkab Kulon Progo, wawancara 13 November 2014).

Dari hasil penuturan informan tersebut memang benar akibat yang ditimbulkan dari konflik terkait rencana Pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo ini lebih ke arah sosial, yaitu hubungan antara warga yang pro dan kontra terputus sehingga menimbulkan perselisihan diantara dua belah pihak. Hal ini diperkuat oleh dua informan antara lain sebagai berikut:

Mengenai akibat yang di timbulkan oleh pihak yang pro dan kontra adalah terutama masyarakat yang netral itu sangat kasihan sekali karena mereka dianggap...sebetulnya diam tapi dianggap setuju oleh pihak yang kontra atau tidak setuju. Terkait penyegelan Balai Desa yang dilakukan oleh kelompok yang kontra selama ini euh...sudah ditangani keranah hukum. Pihak kepolisian sudah melakukan penyelidikan, selama ini ada 7 terduga yang mengakibatkan pelayanan publik terhambat. Tentu saja penegak hukum yang akan menindak orang yang melanggar tindak pidana. (Bapak Agus, Kepala Desa Glagah, wawancara 11 November 2014).

Wawancara dengan Bapak Suhadi, Penolak Bandara:

Kemarin kan terjadi penyegehan kan terus proses hukum itu. proses hukum ya sampai saat ini saya juga belum tau tetep itu proses, kemaren kayaknya sampai pemanggilan saksi-saksi. Penyegehan itu yang menangani Polres itu, yang saya terima katanya itu tetep lanjut, katanya itu pengrusakan itu. Pengrusakan fasilitas Balai Desa. Namun nanti yang lebih tau keterkaitan ini karena proses dah ke ranah hukum bagi mereka warga-warga yang dipanggil Polres di BAP. Jadi saksinya tidak hanya satu dua, tapi banyak, banyak. Itu WTT. (Bapak Suhadi, Penolak Bandara, wawancara 13 November 2014).

Dari hasil penuturan informan tersebut peneliti menganalisis bahwa akibat dari penyegehan Balai Desa yang dilakukan oleh warga penolak Bandara ini mengakibatkan anggota WTT dipanggil oleh pihak kepolisian terkait dugaan penyegehan dan perusakan fasilitas Desa Glagah. Pemkab Kulon Progo maupun Pemerintah Desa Glagah menyerahkan semuanya kepada pihak yang berwajib, yaitu pihak kepolisian untuk menangani kasus tersebut. Akibat yang ditimbulkan dari konflik terkait rencana pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, yaitu krisis sosial dan aksi penyegehan serta pengrusakan fasilitas Balai Desa Glagah yang mengakibatkan pelayanan publik terganggu yang dilakukan oleh kelompok WTT yang berujung dengan pemanggilan 7 terduga untuk diproses lebih lanjut.

e. Pascakonflik

Konflik terkait rencana pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo sampai saat ini masih terus berlangsung. Aksi-aksi penolakan pun masih saja dilakukan oleh kelompok WTT. Namun, pihak Pemkab Kulon Progo berupaya melakukan pendekatan-pendekatan dengan warga baik yang pro maupun yang kontra terkait rencana pembangunan Bandara Internasional tersebut harapan konflik ini bisa terselesaikan dengan baik.

Untuk mengakhiri konflik ya kita lebih ke pendekatan hati, kita intinya mendukung pembangunan Bandara itu bukan terus semena-mena harus di itu tidak. Tapi, kita meyakini bahwa dengan adanya Bandara itu kemungkinan besar akan terjadi peningkatan perekonomian, seperti misalnya di Bandara Minangkabou, itu kenyataan itu sudah nyata keliatan bahwa kondisi perekonomian meningkat dan tetep pendekatannya lebih ke hati nurani tidak kasar atau tidak dengan komunikasi apa itu namanya black and plant yang saling membalas itu tidak. Jadi dari sisi komunikasi kita memberikan lebih memberikan penjelasan yang sebenar-benarnya tentang kondisi proyek yang sedang dilaksanakan saat ini, memberikan informasi yang benar, apa adanya, sesuai dengan pengetahuan Pemkab. (Bapak Isman, Staff Humas Pemkab Kulon Progo, wawancara 13 November 2014).

Dr. Sutaryono, Kaprodi Pembangunan Wilayah, Fakultas Geografi UGM:

Karena kehadiran Bandara baru dengan kapasitas yang jauh lebih besar dapat memberikan banyak manfaat diantaranya: meningkatkan pelayanan transportasi bagi masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya, mengurangi kepadatan lalu lintas di Kota Yogyakarta, menumbuhkan pusat kegiatan baru mempercepat dan meningkatkan arus perdagangan, membuka

lapangan pekerjaan baru, meningkatkan pendapatan daerah, mempercepat tercapainya visi pembangunan DIY. (Dr. Sutaryono, Kaprodi Pembangunan Wilayah, Fakultas Geografi UGM, Kedaulatan Rakyat, 16 September 2014).

Kehadiran Bandara Baru akan membawa dampak positif bagi masyarakat yang berada disekitar Bandara yaitu perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kulon Progo khususnya di Kecamatan Temon mengalami peningkatan. Humas Pemkab Kulon Progo telah berusaha melakukan pendekatan-pendekatan melalui hati ke hati kepada warganya yang akan terdampak Bandara dengan cara memberikan informasi-informasi, penerangan dan pemahaman yang sebenar-benarnya serta apa adanya mengenai proyek pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon, dengan harapan masyarakat bisa mendukung dan menyetujui proyek pembangunan Bandara tersebut. Hal ini juga dikuatkan oleh penuturan informan sebagai berikut:

Selama ini sebetulnya Pemkab juga sudah mengadakan pendekatan-pendekatan baik melalui masyarakat bawah, kelompok-kelompok tertentu, organisasi-organisasi tertentu, baik langsung melalui Bupati maupun lewat SKPD Kulon Progo. (Bapak Agus, Kepala Desa Glagah, wawancara 11 November 2014).

Dari hasil penuturan informan tersebut peneliti menganalisis, bahwa selama ini Humas Pemkab Kulon Progo berperan sebagai proses pemecahan masalah terkait rencana pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon. Humas Pemkab Kulon Progo terus melakukan

pendekatan-pendekatan secara langsung kepada warga masyarakat, baik masyarakat bawah, kelompok-kelompok, maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan, dengan tujuan untuk mengakhiri konflik terkait rencana pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon. Dengan harapan semua lapisan masyarakat di Kecamatan Temon setuju dan mendukung rencana pembangunan Bandara Internasional.

Belum turunnya Sri Sultan Hamengkubuwono selaku Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta membuat konflik yang terjadi di Kecamatan Temon terkait rencana pembangunan Bandara Internasional semakin memanas dan berlarut-larut. Namun, dalam hal ini Pemda DIY tidak tinggal diam, Pemda DIY membentuk tim untuk memberikan penerangan kepada masyarakat baik pro maupun kontra mengenai dampak positif dari pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon. Hasil analisis peneliti juga dikuatkan oleh penuturan informan sebagai berikut:

Pemda DIY turun tangan melalui tim tidak sendirian! (Bapak Isman, Staff Humas Pemkab Kulon Progo, wawancara 13 November 2014).

Wawancara dengan Bapak Agus, Kepala Desa Glagah:

Dalam undang-undang nomor 2 tahun 2012 ini masalah konjungsi tidak bisa ditawar-menawar karena ada Tim nya sendiri yaitu namanya Tim operasional, mereka akan menilai apa yang ada diatas tanah mereka dan apa yang ada dibawah tanah mereka. Tentu saja akan dinilai oleh Tim Operasional dan tentu saja menurut kami tidak akan merugikan masyarakat. (Bapak Agus, Kepala Desa Glagah, wawancara 11 November 2014).

Dr. Sutaryono, Kaprodi Pembangunan Wilayah, Fakultas Geografi UGM:

Tim yang dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda DIY ini dibentuk untuk menindaklanjuti permohonan PT. Angkasa Pura I (Persero) perihal rencana Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk pengembangan Bandara Baru. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah, Tim Persiapan bertugas melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi, dan konsultasi publik untuk pengadaan lokasi. (Dr. Sutaryono, Kaprodi Pembangunan Wilayah, Fakultas Geografi UGM, Kedaulatan Rakyat, 16 September 2014).

Pemda DIY maupun Pemkab Kulon Progo telah membentuk Tim Operasional dalam menangani konflik yang terjadi di Kecamatan Temon terkait rencana pembangunan Bandara Internasional. Dengan dibentuknya Tim tersebut diharapkan kinerja Pemerintah Pemda DIY maupun Pemkab Kulon Progo bisa maksimal sehingga bisa sama-sama memberikan pemahaman kepada warga yang akan terkena dampak mega proyek Bandara. Dengan demikian warga bisa mendapatkan informasi yang akurat mengenai dampak-dampak positif pembangunan Bandara serta ganti rugi lahan warga terdampak dari pembangunan Bandara Internasional tersebut. Dr. Sutaryono mengatakan, masyarakat terdampak harus berpartisipasi aktif menanggulangi munculnya spekulasi tanah yang hanya mencari keuntungan semata, memastikan ganti kerugian yang adil, mengawal proses pembangunan agar berjalan taat asas, dan mengambil bagian dalam pengembangan wilayah DIY menuju masyarakat istimewa dan sejahtera.

2. Peran Humas Pemkab Kulon Progo Dalam Konflik Yang Terjadi di Kecamatan Temon Terkait Rencana Pembangunan Bandara Internasional

Peran Humas berfokus pada kegiatan yang membantu memberikan solusi dalam penyelesaian masalah hubungan dengan publiknya. Dalam hal ini Peran Humas Pemkab Kulon Progo sangat penting dalam mengelola konflik yang terjadi di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, terkait rencana pembangunan Bandara Internasional yang ditolak oleh warga yang tergabung dalam kelompok WTT. Karena Humas Pemkab Kulon Progo merupakan suatu alat atau saluran untuk memperlancar jalannya interaksi dan penyebaran informasi mengenai publikasi pembangunan nasional di Kabupaten Kulon Progo. Rosady Ruslan dalam bukunya yang berjudul "*Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi*" (2007: 20-21) menjelaskan bahwa dalam menjalankan kegiatannya Humas berperan sebagai berikut: Penasihat Ahli, Fasilitator Komunikasi, Fasilitator Pemecahan Masalah, dan Teknisi Komunikasi.

a. Penasihat Ahli

Peran Humas Pemkab Kulon Progo sebagai Penasihat Ahli terkait rencana pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon yaitu dengan cara memberikan solusi pemecahan masalah kepada atasan di dalam pemerintahannya terhadap konflik yang terjadi di wilayahnya.

Nasihat yang diberikan Humas kepada Pemkab selama ini masih nonformal, sebagian besar adalah nonformal, antarlain ketika terjadi konflik secara langsung fisik maka Humas langsung memberikan pernyataan kepada Bupati, dengan kondisi konflik yang seperti itu maka sebaiknya kita melakukan ini ini ini. (Bapak Isman, Staff Humas Pemkab Kulon Progo, wawancara 13 November 2014).

Dari hasil penuturan informan tersebut peneliti menganalisis, bahwa informan merupakan Penasihat Ahli dalam mengelola konflik terkait rencana pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon. Informan menjelaskan bahwa ketika terjadi konflik Humas langsung memberikan saran kepada Bupati untuk melakukan tindakan-tindakan dalam menangani konflik tersebut. Hal senanda diungkapkan kan oleh Rosady Ruslan (2007: 341) Humas pemerintah bertugas memberi nasihat atau sumbang saran untuk menggapai apa yang sebaiknya dilakukan oleh instansi/lembaga pemerintah seperti yang dikehendaki publiknya.

Humas Pemkab Kulon Progo bertindak cepat ketika terjadi konflik. Hal ini juga dikuatkan dengan pernyataan informan sebagai kroscek pembenaran. Informan tersebut menyatakan sebagai berikut:

Selama ini sebetulnya Pemkab juga sudah mengadakan pendekatan-pendekatan baik melalui masyarakat bawah, kelompok-kelompok tertentu, organisasi-organisasi tertentu, baik langsung melalui Bupati maupun lewat SKPD Kulon Progo. (Bapak Agus, Kepala Desa Glagah, wawancara 11 November 2014).

Dari penjelasan tersebut bahwa dalam hal ini posisi Humas sebagai Penasihat Ahli sangat berperan penting. Informan sebagai Penasihat Ahli telah berperan untuk proses pemecahan masalah yang dihadapi oleh Pemkab Kulon Progo. Bupati langsung melakukan pendekatan-pendekatan dengan warga yang menolak rencana pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon sesuai dengan yang disarankan oleh Humas.

b. Fasilitator Komunikasi

Peran Humas sebagai Fasilitator Komunikasi juga di Perankan oleh Humas Pemkab Kulon Progo sebagai perantara komunikasi antara publik internal maupun publik eksternal di instansi pemerintahanya. Humas Pemkab Kulon Progo dalam hal ini membuat tim pelaksana Pusat Pelayanan Informasi dan Aduan Masyarakat yang selanjutnya disebut PPID. Dalam pelaksanaan kegiatannya, PPID Kabupaten Kulon Progo selain memberikan pelayanan permohonan informasi, juga melakukan pelayanan terhadap aduan/saran/kritik/usulan dari masyarakat, sehingga semakin menambah fungsi/peran Humas Pemkab Kulon Progo, dengan

harapan menjadikan pelayanan informasi dan aduan masyarakat semakin sederhana, cepat, dan murah. Masyarakat dapat mengadakan aduannya langsung kepada PPID Kulon Progo dengan berbagai media yang tersedia seperti meja layanan langsung, SMS *center*, telepon, *email* PPID Kulon Progo, *website* PPID Kulon Progo, dan *website* Pemkab Kulon Progo. Dalam konflik yang terjadi di Kecamatan Temon terkait rencana pembangunan Bandara Internasional, Humas Pemkab Kulon Progo berperan sebagai Fasilitator Komunikasi karena Humas Pemkab Kulon Progo sebagai jembatan penghubung untuk menyampaikan informasi terkait pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon kepada publik internal dan publik eksternal.

Sebagai Fasilitator Komunikasi kita lebih arahnya lebih ke koordinasi ke wartawan. Nah, dengan kita memberikan informasi yang benar tentang kondisi proses pembangunan Bandara itu kalo sebenarnya itu masih seperti ini ini ini gitu, prosesnya sampai disini. Terus bagaimana kita bernegosiasi dengan wartawan media supaya sebaiknya untuk masalah seperti ini jangan di terlalu dibesar-besarkan. Jadi lebih ke pengelolaan dengan media. (Bapak Isman, Staff Humas Pemkab Kulon Progo, wawancara 13 November 2014).

Berdasarkan hasil penuturan informan tersebut peneliti menganalisis bahwa peran Humas Pemkab Kulon Progo sebagai Fasilitator Komunikasi terkait rencana pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon yaitu dengan berkoordinasi dengan para awak media untuk memberikan informasi-informasi yang aktual mengenai proyek pembangunan Bandara di Kecamatan Temon. Hal ini

senada dengan yang di ungkapkan Dimcok dan Koenig dalam Rosady Rusalan (2007: 341), Humas memberikan penerangan atau informasi tentang apa yang telah diupayakan oleh suatu lembaga atau instansi pemerintahan yang bersangkutan.

Humas Pemkab Kulon Progo mengadakan sosialisasi kepada warga yang akan terkena dampak mega proyek Bandara di Kecamatan Temon. Humas memberikan penerangan dan informasi kepada masyarakat mengenai dampak positif dari pembangunan Bandara. Hasil analisis peneliti dikuatkan oleh penuturan dua informan sebagai berikut:

Dan tentang sosialisasi disana berkaitan dengan kolom yang sudah sudah ada di undang-undang jadi mereka memang melalui tahapan-tahapan tertentu dan tentu saja tim sudah melakukan sosialisasi. (Bapak Agus, Kepala Desa Glagah, wawancara 11 November 2014).

Wawancara dengan Bapak Suhadi, Penolak Bandara:

Udah! Kulo nuwun istilahnya itu, pengadaan tanah. Sosialisasi untuk pengadaan tanah. (Bapak Suhadi, Penolak Bandara, wawancara 13 November 2014).

Humas berperan sebagai Komunikator dalam kegiatan sosialisasi terkait rencana pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon. Humas membantu pihak Pemkab untuk mendengarkan apa yang diinginkan dan diharapkan oleh warganya, serta memberikan penerangan-penerangan mengenai dampak-dampak positif jika ada Bandara di Kabupaten Kulon Progo. Dengan adanya sosialisasi diharapkan warga bisa memahami, mendukung, serta menciptakan toleransi yang baik.

Gambar 9
Kegiatan Sosialisasi Bandara



Sumber data: PPID Kulon progo

c. Fasilitator Pemecahan Masalah

Peran Humas Pemkab Kulon Progo sebagai Fasilitator Pemecahan Masalah dalam konflik yang terjadi di Kecamatan Temon terkait rencana Pembangunan Bandara Internasional sangat berperan penting dalam penanganan masalah. Humas menjalankan perannya selama konflik terjadi, berkomunikasi kepada warga masyarakat, pemerintahan, dan media. Humas membantu Pimpinan dalam pemerintahannya sebagai penasihat, Humas memberikan arahan kepada Bupati tentang apa yang seharusnya dilakukan terkait konflik Bandara.

Kalau proses pemecahan masalahnya kita memberikan pengarahan bagaimana komunikasi yang seharusnya dilakukan kepada Pemkab terhadap konflik yang terjadi disekitar Bandara. Tapi tidak sampai cara pengatasan. Jadi tim sudah ada, dari segi komunikasi kita memberikan masukan, sekedar masukan tapi bukan pemecahannya itu sudah ada tim nya sendiri. (Bapak Isman, Staff Humas Pemkab Kulon Progo, wawancara 13 November 2014).

Dari hasil penuturan informan tersebut peneliti menganalisis, Humas berperan sebagai Fasilitator Pemecahan masalah yaitu dengan memberikan arahan kepada pimpinan dan pemerintahannya mengenai strategi yang seharusnya dilakukan untuk bertindak menangani konflik yang terjadi di Kecamatan Temon terkait rencana pembangunan Bandara Internasional. Rosady Ruslan (2007: 341) mengungkapkan, Humas harus mempunyai kemampuan untuk mengusahakan terjadinya hubungan memuaskan yang diperoleh antara hubungan publik dengan para aparat pemerintah. Dalam hal ini Humas pun membuat Tim untuk membantu Pemkab menangani konflik yang terjadi di Kecamatan Temon. Hal ini dikuatkan oleh penuturan informan lain sebagai berikut:

Untuk mengatasinya ya kita membuat tim. (Bapak Isman, Staff Humas Pemkab Kulon Progo, wawancara 13 November 2014).

Wawancara dengan Bapak Agus, Kepala Desa Glagah:

Selama ini pemerintah sudah melalui tahapan-tahapan, pertama sosialisasi, kedua pendataan awal, ketiga yang akan segera dilaksanakan adalah konsultasi publik. Tentu saja akan dinilai oleh Tim operasional dan tentu saja menurut kami tidak akan merugikan masyarakat. (Bapak Agus, Kepala Desa Glagah, wawancara 11 November 2014).

Dari hasil penuturan informan tersebut Humas Pemkab Kulon Progo sebagai Fasilitator Pemecahan Masalah yaitu membantu pimpinan memberikan sumbangan saran, arahan, dan nasihat. Humas dibantu oleh Tim dalam memecahkan masalah yang terjadi terkait rencana pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon.

Sekarang sudah melakukan juga, yang akan terkena dampak itu misalnya mencari kira-kira kalo mereka ingin pindah rumah, pindah lahan, lahanya dimana itu sudah mulai dicarikan, cuman dimananya belum ketemu. Terus berupaya memberikan pelatihan-pelatihan pendidikan yang tepat untuk mereka sesuai dengan kemampuannya supaya ketika ada Bandara itu bisa ikut terjun langsung. Jadi tidak sekedar membangun terus kita diem saja...kita tidak! Tetep, kita tetep memperjuangkan! (Bapak Isman, Staff Humas Pemkab Kulon Progo, wawancara 13 November 2014).

Humas berupaya memperjuangkan warganya dengan mencari lokasi lahan pengganti untuk warga yang akan terkena dampak mega proyek Bandara dan memberikan pelatihan-pelatihan kepada warga, dengan harapan ketika ada Bandara masyarakat sudah siap dan mempunyai *skill* sehingga bisa terserap menjadi tenaga kerja lokal dan membuka usaha di Bandara. Pemkab Kulon Progo tidak akan menelantarkan warganya dengan dibangunnya Bandara Internasional di Kecamatan Temon tersebut.

d. Teknisi Komunikasi

Peranan Teknisi Komunikasi hanya menyediakan layanan Teknisi Komunikasi atau dikenal dengan *methode of communication in organization*. Dalam konflik yang terjadi di Kecamatan Temon terkait rencana pembangunan Bandara Internasional, Humas Pemkab Kulon Progo berperan sebagai Teknisi Komunikasi yaitu dengan membuat *Press Release* mengenai perkembangan, maksud, tujuan, dan manfaat dibangunnya Bandara Internasional. Humas bertugas mempublikasi informasi-informasi mengenai rencana pembangunan Bandara yang akan dibangun di Kecamatan Temon melalui media internet yang tersedia. Hal ini senanda diungkapkan oleh Rusady Ruslan (2007: 342) Humas berupaya memberikan penerangan atau informasi kepada masyarakat tentang pelayanan masyarakat, kebijaksanaan serta tujuan yang akan dicapai oleh pemerintah dalam melaksanakan program kerja tersebut. Humas Pemkab Kulon Progo fokus berkoordinasi dengan media untuk memberikan berita yang aktual serta tidak mengurangi atau lebih-lebihkan pemberitaan mengenai mega proyek Bandara.

Kita anu masih standar saja, jadi misalnya ada acara sosialisasi kita memberikan press release sesuai dengan acara yang ada, bukan terus ada konflik kita membuat analogi terus kita membuat perss release tidak seperti itu. Selama ini seperti itu. (Bapak Isman, Staff Humas Pemkab Kulon Progo, wawancara 13 November 2014).

Dari hasil penuturan informan tersebut, peneliti menganalisis bahwa Humas sebagai Teknisi Komunikasi terkait konflik rencana pembangunan Bandara Internasional di kecamatan Temon membuat *press release* dalam kegiatannya. Humas sangat berhati-hati dalam bertindak, terkait konflik yang sedang memanas di Kecamatan Temon. Dalam perannya sebagai Teknisi Komunikasi Humas juga berkoordinasi dengan para awak media untuk memberikan pemberitaan-pemberitaan yang aktual mengenai konflik yang terjadi di Kecamatan Temon. Dengan begitu masyarakat akan mengetahui perkembangan-perkembangan terkini terkait rencana pembangunan Bandara tersebut, dengan harapan konflik tidak semakin memanas dan semua lapisan masyarakat bisa mendukung rencana pembangunan Bandara Internasional tersebut.

3. Pengelolaan Konflik Yang Dilakukan Oleh Humas Pemkab Kulon Progo Terkait Rencana Pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon.

Konflik dapat menjadi masalah yang serius jika konflik tersebut di biarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian, oleh karena itu pengelolaan konflik sangat diperlukan. Simon Fisher, dkk (2001: 19) dalam bukunya yang berjudul “*Mengelola Konflik, Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*” mengungkapkan pengelolaan konflik bertujuan untuk membatasi dan

menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku yang positif bagi pihak-pihak yang terlibat. Dalam hal ini peneliti akan menyajikan pengelolaan konflik yang dilakukan oleh Humas Pemkab Kulon Progo terkait rencana pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon, diantaranya sebagai berikut:

a. Avoidance

Humas Pemkab Kulon Progo dalam hal ini tidak melakukan penghindaran atau menghindari konflik yang terjadi di Kecamatan Temon terkait rencana pembangunan Bandara Internasional. Humas selalu melakukan pendekatan-pendekatan kepada warga masyarakat.

Ini tidak. Ini tidak bisa kita menghindari orang-orang yang berkonflik, justru kita tetap mendekatinya. Semakin mendekat untuk mengetahui bagaimana keinginan mereka tuh bagaimana, malah kalo bisa kita duduk bersama dalam satu forum yang fer gitu ya, jadi silahkan kalo menolak, menolaknya kenapa? terus mintanya apa gitu. Jadi tidak menghindari kita tetap fer tetap sama-sama berkomunikasi. Arus komunikasi itu tidak merasa diputus oleh pemerintah atau kita memutus itu tidak, mereka sendiri yang justru menghindar. (Bapak Isman, Staff Humas Pemkab Kulon Progo, wawancara 13 November 2014).

Dari hasil penuturan informan tersebut peneliti menganalisis, bahwa Humas Pemkab Kulon Progo dalam hal ini tidak melakukan penghindaran konflik. Rosady Ruslan (2007: 341) mengungkapkan Humas mampu menanamkan keyakinan dan kepercayaan serta mengajak masyarakat dalam partisipasinya atau ikut serta pelaksanaan program

pembangunan, sosial, budaya, ekonomi, politik, serta menjaga stabilitas dan keamanan nasional.

Humas Pemkab Kulon Progo melakukan pendekatan-pendekatan kepada warga masyarakat untuk bisa mengetahui keinginan warganya yang akan terkena dampak mega proyek Bandara. Hal ini sama dengan yang diungkapkan oleh Rosady Ruslan (2007: 341) Humas bertugas mengamati dan mempelajari tentang hasrat, keinginan-keinginan dan aspirasi yang terdapat dalam masyarakat. Hal ini juga dikuatkan oleh pernyataan informan lain sebagai kroscek pembenaran, informan tersebut menyatakan sebagai berikut:

Selama ini sebetulnya Pemkab juga sudah mengadakan pendekatan-pendekatan baik melalui masyarakat bawah, kelompok-kelompok tertentu, organisasi-organisasi tertentu, baik langsung melalui Bupati maupun lewat SKPD Kulon Progo. (Bapak Agus, Kepala Desa Glagah, wawancara 11 November 2014).

Dari hasil penuturan informan tersebut peneliti menganalisis, bahwa selama ini Humas Pemkab Kulon Progo berperan sebagai proses pemecahan masalah terkait rencana pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon. Humas Pemkab Kulon Progo terus melakukan pendekatan-pendekatan secara langsung kepada warga masyarakat, baik masyarakat bawah, kelompok-kelompok, maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan, dengan tujuan untuk mengakhiri konflik terkait rencana

pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon. Dengan harapan semua lapisan masyarakat di Kecamatan Temon setuju dan mendukung rencana pembangunan Bandara Internasional.

b. Informal Problem Solving

Humas Pemkab Kulon Progo melakukan pemecahan masalah secara informal dalam mengelola konflik yang terjadi di Kecamatan Temon, dalam hal ini Humas memberikan saran kepada Pimpinan yaitu Bupati untuk melakukan pendekatan secara informal kepada warga yang akan terkena dampak mega proyek Bandara di Kecamatan Temon.

Secara informal jelas! Misalnya, pemecahan masalah itu misalnya ada anggota WTT, keluarga anggota WTT yang meninggal Bupati sendiri langsung turun kesana takziah itu secara informal. (Bapak Isman, Staff Humas Pemkab Kulon Progo, wawancara 13 November 2014).

Dari hasil penuturan informan tersebut peneliti menganalisis, bahwa Humas berperan sebagai pemecah masalah. Humas memberikan saran kepada Bupati untuk melakukan pendekatan secara informal di wilayah yang akan terkena dampak mega proyek Bandara. Pemkab Kulon Progo melakukan safari masjid di wilayah calon Bandara, dengan mengisi ceramah keagamaan dan memberikan bantuan kepada warga, serta melakukan pendekatan dengan cara hati ke hati. Hal ini juga dikuatkan oleh foto yang diberikan Humas kepada peneliti sebagai berikut:

Gambar 10

Kegiatan Safari Ramadhan



Sumber data: PPID Kulon Progo

Gambar 11

Syawalan Dengan Warga Terdampak Bandara



Sumber data: PPID Kulon Progo

Pemkab Kulon Progo telah melakukan pemecahan masalah secara informal melalui silaturahmi dengan warga baik yang pro, netral, maupun yang kontra terhadap mega proyek Bandara. Pemkab mendekati diri dengan warga masyarakat tanpa membedakan antar masyarakat, semua didengarkan keluhanya dan membantu masyarakat mengatasi permasalahan termasuk ganti rugi warga. Pemkab mengusahakan terjadinya hubungan yang memuaskan antara masyarakat, pemerintah dan PT. Angkasa Pura I (Persero) selaku pembangun Bandara.

c. Negotiation

Negosiasi telah dilakukan oleh Humas Pemkab Kulon Progo dalam mengelola konflik terkait rencana pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Isman selaku staff Humas Pemkab Kulon Progo, sebagai berikut:

Oh jelas kalo ini sudah sering melakukan negosiasi. Kita selalu bernegosiasi hanya saja memang mereka sudah tertutup karena prinsipnya pokoke tidak! Tidak mau! kita sudah sampe ke masyarakat dari hati ke hati mewawancarai bahwa mereka tuh sebenarnya ya rata-rata pemilik tanah itu it's oke oke saja cuman memang ada beberapa keinginan yang pengen dipenuhi. (Bapak Isman, Staff Humas Pemkab Kulon Progo, wawancara 13 November 2014).

Dari hasil penuturan tersebut peneliti menganalisis, bahwa informan adalah negosiator dalam mengelola konflik yang terjadi di Kecamatan Temon. Pemkab Kulon Progo menyadari bahwa konflik yang terjadi di

Kecamatan Temon terkait rencana pembangunan Bandara Internasional merupakan permasalahan yang tidak mudah. Banyak pro dan kontra yang terjadi ditengah-tengah masyarakat terkait rencana pembangunan Bandara Internasional tersebut yang membuat pembangunan mega proyek Bandara terancam molor dari jadwal yang telah ditargetkan.

Humas melakukan pendekatan kepada warga yang menolak Bandara dengan cara *heart to heart*. Humas mendengarkan apa yang di inginkan oleh warganya. Hal tersebut juga dikuatkan oleh penuturan informan lain sebagai kroscek pbenaran, informan tersebut menyatakan sebagai berikut:

Kalau mengenai negosiasi tentang pembangunan Bandara Pemkab sudah pernah bersama kami ke tempat WTT. (Bapak Agus, Kepala Desa Glagah, wawancara 11 November 2014).

Humas Pemkab Kulon Progo menjadi negosiator dalam mengelola konflik yang terjadi di Kecamatan Temon terkait rencana pembangunan Bandara Internasional. Humas melakukan negosiasi bersama Kepala Desa setempat kepada anggota WTT sebagai kelompok yang menolak rencana pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon. Humas melakukan pendekatan-pendekatan dengan perwakilan warga, dan organisasi-organisasi kemasyarakatan.

Selama ini sebetulnya Pemkab juga sudah mengadakan pendekatan-pendekatan baik melalui masyarakat bawah, kelompok-kelompok tertentu, organisasi-organisasi tertentu, baik langsung melalui Bupati maupun lewat SKPD Kulon Progo. (Bapak Agus, Kepala Desa Glagah, wawancara 11 November 2014).

Hal ini senada dengan pendapat Roy J. Lewicki, dkk (2012: 19), negosiator harus mampu menyadari situasi-situasi yang membutuhkan lebih dari satu pendekatan dibandingkan situasi yang lain: situasi-situasi yang memerlukan strategi dan taktik distributif secara dominan, dan situasi-situasi yang membutuhkan strategi dan taktik integratif.

d. Mediation

Dalam mengelola konflik terkait rencana pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon, Humas Pemkab Kulon Progo tidak berperan sebagai mediator. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Isman, selaku staff Humas Pemkab Kulon Progo, sebagai berikut:

Ya sebenarnya ingin memediasi cuman masalahnya tadi mereka menolak. Sering menolak! Mereka dengan Pemerintah dah nggak mau, ketidakmauan. (Bapak Isman, Staff Humas Pemkab Kulon Progo, wawancara 13 November 2014).

Dari hasil penuturan informan tersebut, peneliti menganalisis bahwa Humas tidak bisa melakukan mediasi dengan warga yang kontra terhadap rencana pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon, dikarenakan warga yang kontra terhadap rencana pembangunan Bandara

sudah menutup diri dan tidak mau berkomunikasi lagi dengan pemerintah. Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Agus, selaku Kepala Desa Glagah, sebagai berikut:

Selama ini pihak yang menolak itu di mediasi sama siapapun kayaknya akan sulit menerima. Mereka berprinsip pokoknya ora tentang rencana Bandara yang akan ditempatkan diwilayah Temon. (Bapak Agus, Kepala Desa Glagah, wawancara 11 November 2014).

Wawancara dengan Bapak Suhadi, penolak Bandara, sebagai berikut:

Pemkab dengan warga yang menolak sepengetahuan saya belum ada titik temu duduk bersama. Belum ada! (Bapak Suhadi, Penolak Bandara, wawancara 13 November 2014).

Dari hasil penuturan kedua informan tersebut, Humas Dalam hal ini tidak berperan sebagai mediator terkait konflik pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon, hal ini dikarenakan warga yang menolak rencana pembangunan Bandara sudah menutup diri dan tidak mau berkomunikasi dengan pemerintah, warga penolak Bandara berprinsip pokoknya tidak! Hal ini lah yang membuat Humas kesulitan untuk memediasi warganya. Hal senada diungkapkan oleh Ismail Nawawi (2009: 37) sikap mereka yang tidak kooperatif dan sikap bertahan pada posisinya dapat dilatarbelakangi oleh sikap marah (*nager* dan *bostility*), takut (*fear*), dan rasa curiga atau tidak percaya (*distrust*), sehingga sering kali untuk mendengar kita saja mereka menolak.

e. Executive Dispute Resolutions Approach

Dalam *Executive Dispute Resolutions Approach* Humas Pemkab Kulon Progo belum bisa menghadirkan pihak ketiga untuk memberi suatu bentuk penyelesaian konflik. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Isman, Staff Humas Pemkab Kulon Progo, sebagai berikut:

Menghadirkan pihak lain ini sama saja dengan mediasi ini, ya belum bisa menghadirkan! (Bapak Isman, Staff Humas Pemkab Kulon Progo, wawancara 13 November 2014).

Dari hasil penuturan informan tersebut peneliti menganalisis, Humas belum bisa menghadirkan pihak ketiga untuk memberi suatu bentuk penyelesaian konflik, hal ini disebabkan warga yang kontra terhadap rencana pembangunan Bandara menolak diajak berkomunikasi dengan siapapun. Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Herry, selaku Kabag Pemerintahan Pemkab Kulon Progo, sebagai berikut:

Untuk sementara ini belum! (Bapak Heri, Kepala Bagian Pemerintahan Pemkab Kulon Progo, wawancara 18 November 2014).

Dari hasil penuturan informan tersebut, bahwa Humas Pemkab Kulon Progo belum bisa menghadirkan pihak ketiga untuk memberi suatu bentuk penyelesaian konflik yang terjadi di Kecamatan Temon terkait rencana pembangunan Bandara Internasional. Ini disebabkan warga yang kontra terhadap rencana pembangunan Bandara berprinsip pokonya tidak! Warga yang kontra tidak mau diajak berkomunikasi dengan siapapun baik

itu pemerintah maupun PT. Angkasa Pura I (Persero) terkait pembangunan Bandara yang akan dibangun di lima Desa, yaitu Desa Glagah, Sidutan, Jangkar, Palihan dan Kebonrejo. Unsur profokasi yang membuat warga tidak mau berkomunikasi lagi dengan aparat pemerintah, baik itu Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo maupun Pemerintah Desa setempat.

f. Arbitration

Arbitration juga tidak diperankan oleh Humas dalam mengelola konflik terkait rencana pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon, Humas Pemkab Kulon Progo belum bisa menghadirkan pihak ketiga yang dipandang netral atau imprasial.

Ini juga sama kita belum bisa menghadirkan! (Bapak Isman, Staff Humas Pemkab Kulon Progo, wawancara 13 November 2014).

Wawancara dengan Bapak Suhadi, Penolak Bandara, sebagai berikut:

Sepengetahuan saya belum mas, belum! (Bapak Suhadi, Penolak Bandara, wawancara 13 November 2014).

Dari hasil penuturan kedua informan tersebut, peneliti menganalisis bahwa Humas belum bisa menghadirkan pihak ketiga yang dianggap netral atau imprasial, ini disebabkan warga yang kontra terhadap rencana pembangunan Bandara sudah menutup diri, tidak mau bertemu dan dipertemukan dengan pihak manapun, baik pihak aparat pemerintahan

maupun pihak PT. Angkasa Pura I (Persero). Warga yang kontra berprinsip pokoknya Bandara harus dibatalkan. Warga takut pembangunan Bandara hanya akan membuat masyarakat sengsara, karena Bandara akan dibangun diatas lahan pertanian warga yang subur dan produktif.

g. Judicial Approach

Pendekatan judicial telah dilakukan oleh Humas Pemkab Kulon Progo dalam mengelola konflik terkait rencana pembangunan Bandara Internasional yang ditolak oleh warga. Dalam hal ini Humas melakukan pendekatan dengan pihak kepolisian untuk memberi kepastian hukum terkait penyegelan Balai Desa yang mengakibatkan pelayanan publik terganggu.

Iya. Namun, kalau penyegelan Balai Desa itu kan dari pihak Desa sendiri, masyarakat dirugikan tidak bisa terlayani dari kejadian tersebut. Jelas kepastian hukumnya. (Bapak Isman, Staff Humas Pemkab Kulon Progo, wawancara 13 November 2014).

Wawancara dengan Bapak Suhadi, Penolak Bandara, sebagai berikut:

Kemarin kan terjadi penyegelan kan itu terus proses hukum itu. Proses hukum ya sampai saat ini saya belum tau, tetep itu proses. Kemaren kayaknya sampai pemanggilan saksi-saksi. Penyegelan itu yang menangani Polres itu, yang saya terima katanya tetep lanjut, katanya itu pengrusakan itu. Pengrusakan fasilitas Balai Desa. Proses sudah keranah hukum bagi mereka warga-warga yang dipanggil Polres di BAP. (Bapak Suhadi, Penolak Bandara, wawancara 13 November 2014).

Dari hasil penuturan informan tersebut peneliti menganalisis bahwa benar terjadi intervensi yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang yaitu pihak kepolisian dalam memberi kepastian hukum. Warga penolak Bandara yang melakukan penyegelan Balai Desa Glagah dipanggil pihak kepolisian untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus penyegelan Balai Desa Glagah. Hasil analisis peneliti juga dikuatkan oleh penuturan Kades Glagah:

Terkait penyegelan Balai Desa yang dilakukan oleh kelompok yang kontra selama ini sudah ditangani keranah hukum. Pihak kepolisian sudah melakukan penyelidikan, selama ini ada 7 terduga yang mengakibatkan pelayanan publik terhambat. Tentu saja penegak hukum yang akan menindak orang yang melanggar tindak pidana. (Bapak Agus, Kepala Desa Glagah, wawancara 11 November 2014).

Aksi penyegelan dan pengrusakan fasilitas Balai Desa Glagah yang dilakukan oleh kelompok WTT mengakibatkan pelayanan masyarakat terganggu, dan terdapat 7 terduga yang dipanggil oleh pihak kepolisian untuk memberikan keterangan mengenai kasus penyegelan serta pengrusakan Balai Desa Glagah tersebut. Dalam hal ini Humas Pemkab Kulon Progo berperan memberikan klarifikasi kepada para awak media tentang apa yang sebenarnya terjadi terkait penyegelan Balai Desa Glagah yang dilakukan oleh kelompok WTT.

h. Legislative Approach

Pendekatan legislatif juga dilakukan oleh Humas Pemkab Kulon Progo dalam mengelola konflik terkait rencana pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon. Humas melakukan intervensi melalui musyawarah dengan lembaga perwakilan rakyat.

Ya jelas ini sudah, dan rata-rata wakil rakyat sudah setuju mendukung pembangunan Bandara. (Bapak Isman, Staff Humas Pemkab Kulon Progo, wawancara 13 November 2014).

Wawancara dengan Bapak Agus, Kades Glagah, sebagai berikut:

Ditingkat legislatif pun ini sudah pernah melalui DPR, itu udah sering di diskusikan lewat porsinya masing-masing, misalnya kan di Dewan ada, apa tuh kalau di Dewan kan ada anu, apa itu namanya, istilahnya bidang masing-masing. (Bapak Agus, Kepala Desa Glagah, wawancara 11 November 2014).

Dari hasil penuturan informan tersebut, peneliti menganalisis bahwa Humas memang melakukan pendekatan legislatif dengan lembaga perwakilan rakyat secara musyawarah. Humas mengundang perwakilan warga yang akan terkena dampak mega proyek Bandara yaitu para Kepala Desa dari wilayah yang akan terdampak. Hasil analisis peneliti juga dikuatkan oleh penuturan Kades Glagah sebagai berikut:

Padahal kami atas nama pemerintahan Desa yang ditunjuk untuk mengikuti rapat-rapat di tingkat Provinsi dan Kulon Progo selalu menjelaskan kepada masyarakat, pemerintah tidak akan merugikan masyarakatnya dan pasti ganti rugi itu akan sesuai dan layak untuk kehidupan lebih maju dimasa yang akan datang, ataupun untuk generasi-generasi penerus yang akan datang terutama anak cucu kita. (Bapak Agus, Kepala Desa Glagah, wawancara 11 November 2014).

Gambar 12

Kepala Desa Dari Wilayah Terdampak Sedang Mengikuti Rapat Bandara



Sumber Data: PPID Kulon Progo

Humas Pemkab Kulon Progo telah melakukan musyawarah dengan perwakilan rakyat. Kepala Desa yang sangat dekat dengan warga ditunjuk untuk menghadiri rapat-rapat mengenai pembangunan Bandara guna memecahkan permasalahan yang terjadi di Kecamatan Temon. Kepala Desa selalu menjelaskan kepada warganya mengenai manfaat dibangunnya

Bandara Internasional di Kecamatan Temon, dengan harapan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat Kulon Progo meningkat. Dalam hal ini Humas berperan memfasilitasi tempat dan mengatur Tim dari Kabupaten termasuk tindakan yang langsung berhubungan dengan konflik.

Dalam aspek *religy* atau keagamaan perihal musyawarah telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat: 159 yang berbunyi sebagai berikut:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (Sumber data: quran.ittelkom.ac.id diakses 10/12/2014 pukul 15.04 WIB).

Dari ayat tersebut jika dikaitkan dengan pengelolaan konflik yang dilakukan oleh Humas Pemkab Kulon Progo terkait rencana pembangunan Bandara Internasional peneliti dapat mengambil pengertian

bahwa Humas Pemkab Kulon Progo telah menggunakan cara yang damai untuk memecahkan permasalahan yang dialaminya yaitu dengan cara melakukan musyawarah dengan perwakilan warga. Pemkab terus berupaya memberikan penerangan dan pemahaman kepada para kepala Desa dari wilayah terdampak Bandara, dengan harapan pemerintah Desa bisa membantu menyakinkan warganya mengenai dampak positif pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon.

i. Extra Legal Approach

Hukum tambahan telah diterapkan oleh Pemkab Kulon Progo dalam mengelola konflik terkait rencana pembangunan Bandara Internasional. Hal ini ditujukan agar tidak terjadi vandalisme saat konsultasi publik berlangsung.

Kami akan membawa pelaku vandalisme yang beraksi saat tahap konsultasi publik untuk diproses secara hukum. Intinya, siapa saja yang berbuat vandalisme, orang pro atau kontra, tetap akan kami ambil tindakan tegas. (Bupati Kulon Progo, Harian Jogja, 20/11/2014).

Dari hasil penuturan informan tersebut, peneliti menganalisis bahwa Pemkab Kulon Progo telah menerapkan tindakan tegas kepada siapapun, baik warga yang pro maupun kontra, yang berbuat vandalisme ketika berlangsungnya konsultasi publik. Tindakan ini dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan saat berlangsungnya konsultasi publik, dengan tujuan agar konsultasi publik berjalan dengan

baik dan lancar tanpa menimbulkan aksi kriminalitas. Dalam hal ini Humas berperan sebagai penasihat, yaitu dengan memberikan sumbang saran dan nasihat kepada Bupati terkait konflik yang terjadi di Kecamatan Temon.

Ketika terjadi konflik secara langsung fisik maka Humas langsung memberikan pernyataan kepada Bupati, dengan kondisi konflik yang seperti itu maka sebaiknya kita melakukan ini ini ini. (Bapak Isman, Staff Humas Pemkab Kulon Progo, wawancara 13 November 2014).

Humas berperan sebagai penasihat ahli, hal ini terlihat dari tindakan tegas yang dilakukan oleh Bupati, siapapun yang berbuat vandalisme ketika berlangsungnya konsultasi publik akan ditindak dan diproses secara hukum. Pemkab Kulon Progo menyadari bahwa konflik yang terjadi di Kecamatan Temon terkait rencana pembangunan Bandara Internasional bukanlah perkerjaan rumah yang mudah. Pemkab Kulon Progo telah mengambil langkah-langkah untuk merukunkan warganya, namun sampai ini konflik dan ketegangan-ketegangan serta aksi penolakan masih terus terjadi, maka Pemkab Kulon Progo mengambil langkah mengkomunikasikan dengan pihak kepolisian untuk diambil langkah-langkah penegakan hukum. Pemkab Kulon Progo menginginkan Konsultasi Publik berjalan dengan kondusif, sehingga semua masyarakat baik pro maupun yang kontra bisa memahami maksud, tujuan, serta manfaat dibangunnya Bandara Internasional di Kecamatan Temon.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai Peran Humas Dalam Mengelola Konflik (Studi Deskriptif Kualitatif Rencana Pembangunan Bandara Internasional di Kabupaten Kulon Progo periode April – Oktober 2014) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Humas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

a. Penasihat Ahli

Dalam mengelola konflik yang terjadi di Kecamatan Temon terkait rencana pembangunan Bandara Internasional Humas Pemkab Kulon Progo berperan sebagai Penasihat Ahli yaitu dengan membantu memberikan solusi dalam pemecahan masalah serta memberikan pernyataan kepada Bupati mengenai tindakan yang seharusnya dilakukan.

b. Fasilitator Komunikasi

Dalam Peran Humas sebagai Fasilitator Komunikasi, Peran Humas Pemkab Kulon Progo dalam mengelola konflik terkait

rencana pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon yaitu berkoordinasi dan bernegosiasi dengan para awak media serta memberikan informasi yang benar tentang proses pembangunan Bandara, dengan tujuan agar media tidak terlalu membesar-besarkan pemberitaan mengenai pembangunan Bandara di wilayah Temon agar konflik tidak semakin memanas dikalangan masyarakat. Dan mengadakan sosialisasi guna menciptakan hubungan yang saling pengertian, menghargai, dan mendukung.

c. Fasilitator Proses Pemecahan Masalah

Sebagai Fasilitator Proses Pemecahan Masalah Humas Pemkab Kulon Progo berperan membantu Bupati dalam pemecahan masalah yaitu dengan cara membuat tim, mengadakan rapat dengan kepala Desa, memberikan bantuan kepada warga, mengadakan pertemuan antara Pemkab dengan masyarakat guna membahas tuntutan-tuntutan warga, mencarikan lahan pengganti untuk warga yang terkena dampak mega proyek Bandara dan berupaya memberikan pelatihan-pelatihan pendidikan yang tepat kepada warga sesuai dengan kemampuannya. Tujuannya adalah ketika ada Bandara mereka bisa terserap menjadi tenaga kerja lokal di Bandara.

d. Teknisi Komunikasi

Peran Humas yang terakhir sebagai teknisi komunikasi atau *method of communication in organization*. Dalam hal ini Humas Pemkab Kulon Progo berperan mempublikasikan kegiatan yang dilakukan Pemkab dan PT. Angkasa Pura I (Persero) terkait rencana pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon seperti mempublikasikan kegiatan sosialisasi pembangunan Bandara melalui media internet dengan membuat *press release*, dan *newsletter*.

2. Pengelolaan Konflik

a. Avoidance

Humas tidak melakukan penghindaran atau menghindari konflik yang terjadi di Kecamatan Temon terkait rencana pembangunan Bandara Internasional. Humas berperan melakukan pendekatan-pendekatan kepada warga masyarakat dengan tujuan untuk bisa mengetahui tuntutan dan keinginan-keinginan warganya yang akan terkena dampak mega proyek Bandara.

b. Informal Problem Solving

Humas berperan memberikan sumbang saran kepada Bupati untuk melakukan pendekatan secara informal di wilayah yang akan terkena dampak mega proyek Bandara, yaitu dengan cara bersilaturahmi dengan warga melalui kegiatan safari ramadhan, syawalan, memberikan bantuan, dan takziah ketika ada warganya yang meninggal dunia baik itu warga yang netral, pro, maupun yang kontra.

c. Negotiation

Humas berperan melakukan negosiasi kepada warganya yang menolak dengan cara mendatangi langsung kelompok WTT sebagai kelompok yang kontra terhadap rencana pembangunan Bandara dengan didampingi Kepala Desa setempat. Humas melakukan pendekatan-pendekatan dengan perwakilan warga, dan organisasi-organisasi kemasyarakatan.

d. Mediation

Humas dalam hal ini tidak berperan sebagai mediator terkait rencana pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon. Hal ini dikarenakan warga yang menolak rencana pembangunan Bandara sudah menutup diri dan tidak mau

berkomunikasi dengan pemerintah. Warga penolak Bandara berprinsip pokoknya tidak! Terkait pembangunan Bandara di wilayah Temon, ini lah yang membuat Humas kesulitan untuk memediasi warganya.

e. Executive Dispute Resolutions Approach

Humas belum bisa menghadirkan pihak ketiga untuk memberi suatu bentuk penyelesaian konflik yang terjadi di Kecamatan Temon terkait rencana pembangunan Bandara Internasional. Warga yang kontra tidak mau diajak berkomunikasi dengan siapapun baik itu pemerintah maupun PT. Angkasa Pura I (Persero). Unsur profokasi yang membuat warga tidak mau berkomunikasi lagi dengan aparat pemerintah, baik itu Pemerintah Provinsi, Kabupaten, maupun Pemerintah Desa setempat.

f. Arbitration

Humas belum bisa menghadirkan pihak ketiga yang dianggap netral atau imprasial, ini disebabkan warga yang kontra terhadap rencana pembangunan Bandara sudah menutup diri, tidak mau bertemu dan dipertemukan dengan pihak manapun, baik pihak aparat pemerintahan maupun pihak PT. Angkasa Pura I (Persero). Warga yang kontra berprinsip *pokoke* Bandara harus dibatalkan.

Warga takut Bandara hanya akan membuat masyarakat sengsara, karena Bandara akan dibangun diatas lahan pertanian warga yang subur dan produktif.

g. Judicial Approach

Humas berperan melakukan pendekatan dengan pihak kepolisian untuk memberi kepastian hukum terkait penyegelan dan pengrusakan Balai Desa Glagah yang dilakukan oleh kelompok WTT sebagai kelompok yang kontra terhadap rencana pembangunan Bandara Internasional yang mengakibatkan pelayanan publik terganggu.

h. Legislative Approach

Humas berperan melakukan pendekatan legislatif melalui musyawarah dengan lembaga perwakilan rakyat yaitu DPRD, Camat, dan Kepala Desa setempat yang wilayahnya akan terkena dampak mega proyek Bandara guna memecahkan permasalahan yang terjadi di Kecamatan Temon terkait rencana pembangunan Bandara Internasional.

i. Extra Legal Approach

Pemkab Kulon Progo telah menerapkan tindakan tegas kepada siapapun baik itu warga yang pro maupun kontra, yang berbuat vandalisme. Tindakan ini dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan saat berlangsungnya konsultasi publik. Pemkab Kulon Progo menginginkan konsultasi publik berjalan lancar dan kondusif sehingga semua masyarakat baik pro maupun kontra bisa memahami maksud, tujuan, serta manfaat dibangunnya Bandara Internasional di Kecamatan Temon. Dalam hal ini Humas berperan sebagai penasihat ahli dengan memberikan sumbang saran dan pernyataan kepada Bupati tentang apa yang seharusnya dilakukan ketika terjadi konflik secara langsung.

Peran Humas Pemkab Kulon Progo bertanggung jawab dalam mengelola konflik di Kecamatan Temon terkait rencana pembangunan Bandara Internasional. Humas melakukan sosialisasi dan pemecahan masalah secara informal dengan melakukan pendekatan-pendekatan terhadap warga yang akan terkena dampak mega proyek Bandara yang dikemas dalam bentuk kegiatan safari ramadhan, syawalan, takziah, memberi bantuan sarana dan prasarana kepada masyarakat, melakukan negosiasi terhadap warga dan media, melakukan pendekatan judicial dan legislatif dengan

pihak kepolisian, DPRD, Camat, dan Kepala Desa dari lima wilayah terdampak Bandara dalam bentuk musyawarah guna merumuskan solusi pemecahan masalah yang sedang terjadi. Serta memberikan informasi yang aktual sesuai dengan keadaan yang sebenarnya kepada masyarakat dan media terkait pembangunan Bandara di Kecamatan Temon dan menerapkan hukum tambahan bagi warga yang berbuat vandalisme.

B. SARAN

Ada beberapa saran yang peneliti harapkan bisa menjadi masukan, meskipun saran ini jauh dari sempurna. Adapun saran yang dimaksud sebagai berikut:

1. Bagi Penelitian Selanjutnya:

- a. Tantangan bagi peneliti yang berkonsentrasi terhadap penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara yaitu sulitnya mencari informan yang mau diwawancarai peneliti di wilayah terdampak Bandara. Maka, kepada peneliti selanjutnya diharapkan berkordinasi terlebih dahulu dengan pihak pemerintah Desa setempat untuk meminta arahan-arahan sebelum terjun ke daerah konflik.

- b. Terkait hasil yang didapatkan peneliti, peneliti berharap kepada peneliti selanjutnya bisa melakukan wawancara dengan lebih berani mengungkapkan apa yang menjadi temuan peneliti. Sehingga diharapkan bisa mendapatkan semua jawaban yang mendekati sempurna.
- c. Konflik yang telah diteliti oleh peneliti merupakan konflik yang belum tuntas dan dirasa masih akan terus berlanjut. Sehingga kesimpulan-kesimpulan yang belum tersaji dalam penelitian ini masih akan ditemukan sampai proses pembangunan Bandara selesai.

2. Bagi PT. Angkasa Pura I (Persero)

- a. Alangkah baiknya jika PT. Angkasa Pura I (Persero) selaku pembangun dan pengelola Bandara turun tangan langsung menangani konflik yang terjadi. Sehingga masyarakat akan mendapatkan informasi yang detail langsung dari sumbernya mengenai konsep Bandara yang akan dibangun di wilayah Temon.
- b. Diharapkan PT. Angkasa Pura I (Persero) membuat program-program CSR yang berkelanjutan di wilayah yang akan terkena dampak mega proyek Bandara. Tujuannya untuk mendekatkan diri dengan masyarakat sehingga

diharapkan bisa menciptakan hubungan yang saling pengertian, menghargai, dan mendukung.

3. Bagi Pemerintah Provinsi DIY dan Pemkab Kulon Progo

- a. Peneliti berharap alangkah baiknya Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paduka Paku Alam IX selaku Raja sekaligus Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta berkenan turun ke masyarakat, berbicara langsung kepada warga dengan memberikan pemahaman dan penerangan tentang dampak positif pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon. Sebab, penolakan yang terjadi semakin memanas.
- b. Dalam proses menyakinkan masyarakat yang akan terkena dampak mega proyek Bandara, Pemkab harus mempunyai metode komunikasi khusus sehingga tidak hanya terpaku pada Undang – Undang No. 2 Tahun 2010 mengenai pengadaan lahan bagi kepentingan publik saja. Dengan begitu diharapkan warga yang akan terkena dampak mega proyek Bandara memahami serta mendukung program pemerintah ini.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Kitab:

Al-Qur'an dan Terjemahannya. 2009. Diterjemahkan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia. Bandung: Syaamil Al-Qur'an.

Sumber Buku:

Agus M. Hardjana. 1994. *Konflik Di Tempat Kerja*. Yogyakarta: Kanisius

Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Bungin, Burhan. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Fisher, Simon, dkk. 2001: *Mengelola Konflik Keterampilan Dan Strategi Untuk Bertindak*. Jakarta: The British Council, Zed Books.

Ismail Nawawi. 2009. *Manajemen Konflik Industrial*. Surabaya: ITSPress

Kriyantono, Rakhmat. 2006. *Teknis Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana

Moleong. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Novri, Susan. 2010. *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Pawito, Ph. D. 2007. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: LkiS

Roy J. Lewicki, dkk. 2012. *Negosiasi Negotiation*. Jakarta: Salemba Humanika,

Ruslan, Rosadi. 2007. *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Wirawan. 2010. *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika.

Sumber Dokumentasi:

Pusat Pelayanan Informasi dan Aduan (PPID) Kabupaten Kulon Progo.

General Affair and Communication PT. Angkasa Pura I (Persero) Yogyakarta.

Sumber Skripsi:

Skripsi Felicia Lucky Yunita Indraswari “MANAJEMEN KONFLIK DI CIMB NIAGA CABANG YOGYAKARTA” (Studi Kasus Penanganan Konflik Antara Karyawan *ex* Bank Lippo dan Karyawan *ex* Bank Niaga Pasca Merger pada Periode November 2008 - November 2010). (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2014).

Skripsi Wahyono Setyawan “Konflik Antara Masyarakat Dengan Penambang Pasir Besi” (Studi Kasus Di Desa Garongan Kecamatan Panjataan Kabupaten Kulon Progo). (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2012).

Sumber Jurnal:

Jurnal Imelda Rettobjaan “Peranan Humas Dalam Merespon Konflik Internal Pada Universitas Sam Ratulangi Manado” (Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2013).

Sumber Internet:

<http://www.angkasapura1.co.id/detail/berita/sri-sultan-hamengku-buwono-x-tak-ada-lagi-masalah-terkait-pembangunan-bandara-baru-yogyakarta> Diakses pada 9 April 2014 pukul 19.48 WIB.

<http://www.harianjogja.com/baca/2014/11/21/bandara-kulonprogo-pelaku-vandalisme-saat-konsultasi-publik-akan-diproses-hukum-553947> Diakses 27 November 2014 pukul 13.24 WIB.

<http://www.koran-sindo.com/node/358469> Diakses pada 7 September 2014 pukul 13.24 WIB.

<http://www.polkam.go.id/berita/tabid//66/mid/394/newsid394/474/language/id-HD/Default.aspx> Diakses pada 6 Desember 2014 pukul 09.37 WIB.

<http://www.tribunnews.com/regional/2014/04/10/warga-demo-tolak-pembangunan-bandara-temon> Diakses pada 6 Mei 2014 pukul 07.12 WIB.

<http://video.liputan6.com/read/2035482/ricuh-penolakan-pembangunan-bandara-kulon-progo> diakses 11/5/2014 pukul 8.56 WIB.

<http://quran.ittelkom.ac.id/?sid=49&aid=9&pid=arabicid> Diakses pada 22 Mei 2014 pukul 15.59 WIB.